

Implementasi E-Hibah Dan Bantuan Sosial Di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

INA PRATIWI

NIM 6661122241

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, MEI 2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ina Pratiwi
NIM : 6661122241
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 10 Oktober 1993
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI E-HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI BANTEN adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 16 Juli 2018



Ina Pratiwi

LEMBAR PERSETUJUAN

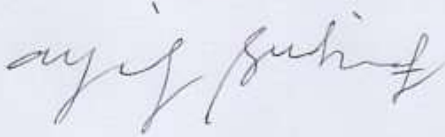
Nama : Ina Pratiwi
Nim : 6661122241
Judul Skripsi : Implementasi E - Hibah Dan Bantuan Sosial Di Biro
Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Serang, 16 Juli 2018

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Disajikan

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM

NIP. 196905022005012001

Pembimbing II



Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si

NIP.197501312005012004

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta



Dr. Agus Sjaafari, S.Sos., M.Si

NIP : 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : INA PRATIWI
Nim : 6661122241
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI E-HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINS BANTEN

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 17 Juli 2018

Ketua Penguji

Dr. Arenawati, S.Sos., M.Si

NIP : 197004102006042001

Anggota :

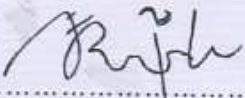
Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si

NIP : 197501312005012004

Anggota :

Anis Fuad, M.Si


NIP : 198009082006041002



.....



.....



.....

Mengetahui



Dekan Fisip Untirta
Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP : 197108242005011002



Ketua Program Studi
Listyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP : 197603292003122001

“Jika Kamu Merasa Tidak Punya Apa –
Apa Berarti Kamu Punya Segalanya.
Karena Kamu Mampu Melakukan Apapun
Tanpa Takut Akan Kehilangan Sesuatu”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk Kedua Orang Tuaku...

Syukurku pada-Mu

Serang, 11 Juli 2018

ABSTRAK

Ina Pratiwi. 6661122241. Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Indonesia termasuk salah satu Negara berkembang dengan jumlah orang kurang mampu yang cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah. Banyaknya jumlah populasi serta tingkat pekerjaan yang tidak merata menjadikan mereka berada di bawah garis kemiskinan selama bertahun – tahun. Provinsi Banten, termasuk dalam provinsi yang baru di Indonesia. Perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih seharusnya membuat masyarakat dapat mengakses informasi apapun di dunia maya, termasuk untuk mencari informasi mengenai bantuan sosial yang di sediakan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *E-Goverment* Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan beberapa langkah yaitu: Observasi, wawancara, dokumentasi serta uji validitas.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Biro kesejahteraan rakyat Provinsi Banten menggunakan Elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut Richardus Eko Indrajit dalam konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi, elemen yang dimaksud ialah *Support* atau Dukungan pemerintah melalui sosialisasi secara merata, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum dengan cara memberikan sosialisasi secara merata . *Capacity* atau Ketersediaan SDM yang handal dan infrastuktur baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program). Dan terakhir yaitu *Value* yang merupakan nilai guna atau manfaat yang didapatkan dari suatu kebijakan maupun program, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal bantuan hibah dan sosial melalui website yang disediakan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Elemen sukses *E-Government*, E-Hibah Bansos, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Abstract

Ina Pratiwi. 6661122241. The implementation of the E-Grants and social assistance the Bureau of welfare of the people of Banten Province.

Indonesia including one of the developing countries with the number of people less able to quite a lot and spread in various areas. The number of the population and the level of work that is not evenly made them under the poverty line for years. Banten Province, including in the new province in Indonesia. The development of technology that is getting more advanced should be made public can access any information in the virtual world, including to search for information on social assistance who are prepared by the government. The purpose of this research is to know the implementation of the E-Government grants and social assistance conducted by the Bureau for the welfare of the people in Banten Province. This research uses qualitative approach with descriptive method, using several steps: observations, interview, documentation and validity test.

The results of the study concludes that the Bureau for the welfare of the people of the Banten Province using elements of the success of the development of E-Government. According to Richardus Eko Indrajit said in the concept of public services based on the internet and information technology, elements that referred to is the support of the government through socialization evenly, consistent and comprehensive to all the bureaucracy, in particular and the society in general with how to provide socialization evenly. The availability of human resources and infrastructure both regarding the hardware (equipment and infrastructure) and software (program). And finally the value that is the benefit obtained from a policy or program so that the community can take advantage of the maximum grant aid and social through the website provided by the government.

Key Words : Elements of successful E-Government, E-Hibah (social assistance), Bureau for the welfare of the People of the Banten Province

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Perlu disebutkan pula bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa beserta Wakil Dekan I, II, III.
2. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Ibu Dr. Ayuning Budiati, S.Ip., M.Si selaku Dosen Pembimbing I skripsi, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan-arrahannya dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar telah memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Seluruh dosen dan staf FISIP, khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi ilmu dan teladan selama ini.
5. Terimakasih kepada pihak Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten yang telah membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran penulis saat penyusunan skripsi ini. Kritik serta saran yang membangun penulis harapkan sebagai bahan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Serang, 11 Juli 2018

Ina Pratiwi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1 Kajian Teori	22
2.1.1 Teori Implementasi	23
2.1.2 Konsep dan Teori <i>E-Government</i>	28
2.1.3 Pengertian <i>E-Government</i>	32
2.1.3.1 Tujuan Penerapan <i>E-Government</i>	32

2.1.3.2 Manfaat <i>E-Government</i>	39
2.1.3.3 Faktor-faktor Pendukung dalam Penerapan <i>E-Gov</i>	41
2.1.4 Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial(Bansos).....	42
2.1.4.1 Pengertian Hibah	42
2.1.4.2 Pengertian Bantuan Sosial (Bansos).....	45
2.2 Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	50
2.4 Asumsi Dasar	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian	58
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	59
3.3 Lokasi Penelitian.....	59
3.4 Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati	60
3.4.1 Definisi Konsep	60
3.4.2 Definisi Operasional	60
3.5 Instrumen Penelitian.....	63
3.6 Informan Penelitian.....	70
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	73
3.8 Jadwal penelitian.....	78
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	79
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten	79
4.1.2 Gambaran Umum Biro Kesejahteraan Rakyat.....	89

4.1.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis	90
4.1.2.2 Struktur Organisasi	91
4.1.2.3 Visi Misi	96
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	97
4.2 Deskripsi Data.....	104
4.3 Informan Penelitian.....	106
4.4 Pembahasan.....	108
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	136
5.2 Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)	7
Gambar 3.7 Proses Analisis Data.....	70
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.....	76

Daftar Tabel

Tabel 2.3 Kerangka Berfikir.....	53
Tabel 3.5 Pedoman Wawancara.....	64
Tabel 3.6 Informan Penelitian.....	68
Tabel 3.8 Jadwal penelitian.....	74
Tabel 4.2 Daftar Informan	89
Tabel 4.3 Daftar Nama Desa di Banten yang di undang sosialisasi.....	92

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Laporan jumlah pengunjung harian website.....	146
Lampiran 2 Daftar calon penerima E-Hibah dan Bansos tahun 2015-2017.....	147
Lampiran 3 Struktur Organisasi Organisasi Biro Kesra Setda Provinsi Banten.....	151
Lampiran 4 Dokumentasi wawancara bersama Staff Biro Kesra Banten.....	151
Lampiran 5 Daftar Absensi dan Dokumentasi Biro Kesra Banten.....	152
Lampiran 6 Dokumentasi wawancara dengan masyarakat umum.....	152
Lampiran 7 Dokumentasi masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Banten.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini menjadi pertimbangan dunia memicu cara baru bagi organisasi, perusahaan, pebisnis, juga pemerintahan ikut terlibat dalam mengakses teknologi berbasis online. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan khususnya Indonesia agar mengejar ketertinggalan kemajuan teknologi yang sudah sangat berkembang lebih dulu di Negara-negara maju. Hampir setiap instansi pemerintah telah menggunakan komputer dan internet sebagai pendukung. Dimana kini dalam melancarkan tugas kenegaraan pemerintah telah mewajibkan penggunaan website. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public services*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Pada era globalisasi ini, keterbukaan informasi menjadi salah satu standarisasi yang harus diaplikasikan oleh semua lembaga kementerian di Indonesia. Mudahnya masyarakat mendapatkan informasi menjadi syarat reformasi birokrasi yang harus diterapkan di semua instansi.

Penerapan website telah meluas ke berbagai bidang, mulai dari perbankan, asuransi, bisnis, manufaktur, pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pemerintahan, aplikasi website digunakan dalam banyak hal diantaranya untuk publikasi segala informasi tentang pemerintahan setiap daerahnya, seperti menginformasikan kebijakan pemerintah, dan berbagai kegiatan pemerintah dari informasi dasar tentang visi misi pemerintahan, program – program pemerintahan baik yang sudah terealisasikan maupun belum, bahkan saat ini pemerintah menyarankan masyarakat untuk mendaftar dan tanya jawab melalui website yang telah disediakan oleh pemerintah, serta berbagai informasi lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak dan masyarakat sebagai sarana komunikasi yang efektif. Keharusan penerapan aplikasi website pada Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota merupakan tuntutan akan informasi yang cepat dan *update* setiap waktu guna mengembangkan kinerja pemerintahan yang lebih maju dan baik lagi mengikuti perkembangan era globalisasi.

Manfaat website Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dapat membantu terbentuknya pemerintahan yang bersifat *Good Governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Manfaat yang didapat dari website Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota adalah dapat memicu semangat dan menarik antusias masyarakat untuk mengembangkan informasi-informasi yang diberikan pemerintah secara lebih cepat, jelas, dan bermanfaat.

Harapan dan kebutuhan masyarakat tentang ketersediaan informasi yang diberikan pemerintah yaitu agar terciptanya keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antara pemerintah kepada berbagai pihak dan terutama seluruh masyarakat menjadi percaya dan berpikir positif akan segala kebijakan yang dibuat pemerintah. Sedangkan informasi berupa data sangat diperlukan masyarakat sebagai acuan dan pengetahuan tentang sebagaimana potensi daerah, statistik dan peluang usaha itu ada. Selain itu manfaat dari adanya website online tersebut dapat menunjukkan potensi yang dimiliki untuk menarik investor sebagai upaya daerah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi berbasis online sebagai wadah dari pemerintah yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penggunaan teknologi informasi online ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*). Bahkan saat ini dengan adanya *e-government*, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah, pariwisata, dan sebagainya. Berdasarkan data Peningkatan E-Government Indonesia (PeGI) oleh Direktorat *E-Government*, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, hanya terdapat 20 Provinsi

pada tahun 2016-2017 yang dapat dinilai kemajuan pemanfaatan *e-government* dari berbagai dimensi penilaian. Daftar provinsi yang terdata yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2016-2017

NO	PROVINSI	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Provinsi DKI Jakarta	3,50	3,40	3,37	3,57	3,13	3,35	BAIK
2	Provinsi Jawa Barat	2,80	3,07	3,20	3,13	3,13	3,07	BAIK
3	Provinsi Jawa Timur	3,27	3,20	3,20	2,80	2,57	3,01	BAIK
4	Provinsi Gorontalo	2,67	2,73	2,80	3,40	3,13	2,95	BAIK
5	Provinsi Bangka Belitung	2,50	3,00	3,20	2,79	3,00	2,90	BAIK
6	Provinsi D.I. Yogyakarta	2,90	2,50	2,50	2,80	2,60	2,66	BAIK
7	Provinsi Jawa Tengah	3,00	2,20	2,67	2,80	2,53	2,64	BAIK
8	Provinsi Bali	2,50	2,50	2,80	2,80	2,53	2,63	BAIK
9	Provinsi Sumatera Utara	2,67	2,67	2,53	2,50	2,53	2,62	BAIK
10	Provinsi Jambi	2,50	2,50	2,73	2,83	2,50	2,61	BAIK
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,60	2,50	2,40	2,57	2,63	2,54	BAIK
12	Provinsi Kalimantan Timur	2,80	2,70	2,80	2,50	1,80	2,52	BAIK
13	Provinsi Aceh	2,33	2,33	2,53	2,53	2,80	2,51	BAIK
14	Provinsi Sumatera Selatan	2,20	2,33	2,53	2,20	2,40	2,33	KURANG
15	Provinsi Sumatera Barat	2,07	1,93	2,13	2,13	1,80	2,01	KURANG
16	Provinsi Kalimantan Selatan	2,00	2,00	1,53	1,93	1,93	1,88	KURANG
17	Provinsi Lampung	1,93	1,53	1,73	1,87	1,73	1,76	KURANG
18	Provinsi Sulawesi Tengah	1,87	1,93	1,53	1,67	1,67	1,73	KURANG
19	Provinsi Sulawesi Barat	1,60	1,53	1,60	2,07	1,80	1,72	KURANG
20	Provinsi Bengkulu	1,56	1,75	1,46	1,47	1,46	1,54	KURANG
	RATA-RATA	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,50	BAIK

Sumber: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2016_Provinsi, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kemajuan penggunaan E-government di berbagai Provinsi masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat beberapa Provinsi yang ternilai kurang baik dalam pelaksanaan E-government dan

dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia hanya terdapat 20 Provinsi yang terdata dalam PeGI tingkat Provinsi tahun 2016-2017.

Beberapa pemerintah daerah yang tidak terdata dalam PeGI disebabkan karena suatu pemerintahan daerah tersebut masih dapat dikatakan belum memaksimalkan penggunaan *E-government* dan masyarakat daerah tersebut belum sepenuhnya menguasai suatu teknologi informasi seperti internet dan sebagainya. Namun disisi lain daerah tersebut tidak kalah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Seperti Provinsi Banten yang saat ini gencar menjalankan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan menegaskan karakteristik-karakteristik *good governance* yang diantaranya yaitu Partisipasi aktif, Tegaknya hukum, Transparansi, Responsif, Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang, Efektif, ekonomis, dan Dapat dipertanggungjawabkan. Mengimbangnya dengan penggunaan *E-government*, Pemerintah Daerah Provinsi Banten meluncurkan Program Hibah dan Bansos berbasis Online yang didalamnya masyarakat dapat berpartisipasi langsung secara efektif dan efisien.

Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu program dari pemerintah sebagai bentuk pengabdian pemerintah kepada masyarakat dan pihak terkait. Hibah dan bantuan Sosial merupakan bantuan dana yang diberikan secara selektif oleh pemerintah berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah

atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ataupun kepada masyarakat yang memiliki ide - ide kreatif yang diusulkan oleh seluruh masyarakat secara perseorangan atau kelompok. Adapun diterapkannya E-Gov pada Hibah dan Bantuan Sosial di Sekretariat Provinsi Banten yaitu mulai dari Januari 2015, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi seputar hibah dan bansos kepada Pemerintah Provinsi Banten, serta menarik antusias masyarakat agar ikut berpartisipasi. Peneliti memilih lokasi penelitian di Provinsi Banten ini disebabkan peneliti menganggap perlu disampaikannya informasi penting ini guna membantu merealisasikan kebijakan pemerintah tersebut agar seluruh masyarakat dapat memberikan input kepada pemerintah agar terciptanya keterpaduan dalam kinerja pemerintah.

Dana yang disediakan dalam program hibah dan bantuan sosial pada tahun 2018 ini terbilang besar, yakni Rp.358.9 Miliar yang nantinya akan dibagikan kepada 66 lembaga sebangun dan masyarakat kurang mampu. Dana yang cukup besar ini tentunya menarik para oknum untuk memainkan anggaran, sejak tahun 2016 ini dana hibah dan bansos menjadi salah satu yang diperhatikan oleh Badan Pengawas Daerah (BPK) karena adanya indikasi korupsi pada dana APBD dana Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam pembuatan dan pengelolaan E-Hibah Bansos Provinsi Banten dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Kementerian Komunikasi dan

Informatika (KOMINFO) sebagai penerima wewenang pemerintah dan Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Provinsi Banten sebagai pelaksananya. Kedua belah pihak yang tergabung didalam Sekretariat daerah Provinsi Banten ini harus mampu bekerjasama dalam mengelola E-Hibah Bansos Provinsi Banten tersebut. Situs website E-Hibah Bansos Provinsi Banten ini dapat di akses melalui domain berikut <http://ehibahbansos.bantenprov.go.id/>. Sesuai undang – undang tertulis Peraturan Menteri KOMINFO no 05 tahun 2015 tentang penggunaan nama domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah.

Tugas pokok dari Biro Kesejahteraan Rakyat ini sebagai Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat. Sebagaimana sebagai pelaksana Biro Kesra memiliki tujuan dari E-Hibah Bansos Provinsi Banten ini yaitu sebagai wadah partisipasi untuk masyarakat agar ikut serta dalam mengawasi dan membantu pencapaian sasaran pembangunan, agar proses penyalurannya bisa dilakukan lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Maka diperlukan adanya umpan balik secara langsung dari masyarakat luas untuk mengontrol langsung bila ditemukan ada penyimpangan. Penerapan sistem informasi melalui media online ini menjadi pembuktian pada masyarakat Banten bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten secara serius terus berupaya melakukan perbaikan. Dari banyaknya manfaat yang tertulis dalam undang-undang yang tercantum diatas, E-Hibah Bansos Provinsi Banten ini ternyata masih banyak memiliki kekurangan meski sudah diterapkan

hampir dua tahun terhitung dari diberlakukannya website online E-Hibah Bansos pada Januari Tahun 2015. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program di kantor pemerintah baik pusat maupun daerah relatif masih rendah dibandingkan dengan sektor swasta. Hal tersebut disebabkan selain karena adanya hambatan di dalam birokrasi itu sendiri, sampai pihak terkait dan pendukung, serta tata kerja yang tidak mudah untuk di ubah atau disempurnakan juga yang menjadi keterbatasan atau hambatan yang dimiliki pemerintah yang menjadikan implementasi sistem informasi manajemen berbasis online tersebut terbatas dan memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan dimajukan.

Program bantuan sosial meliputi tiga yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Hibah, dan Bantuan Sosial (Bansos) Tidak Terencana. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) adalah sebagai pelaksana atau penggerak dari program-program Bansos di seluruh divisi Pemrov banten pada tahun 2014. Namun mulai Tahun 2015 kemarin diberlakukan peraturan baru dari pihak Pemrov Banten bahwa saat ini Bantuan Sosial dari Setiap Divisi dikelola masing-masing divisi, dan Biro Kesra hanya mendapat wewenang untuk mengelola web Bansos dan program bantuan didivisinya sendiri yaitu Bantuan dalam bidang Keagamaan. Banyaknya manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai penerapan sistem informasi melalui website online ini sebagai bentuk dari *E-Government*. Wajib bagi pemerintah untuk saat ini sampai kedepannya selalu meningkatkan mutu pelayanan terhadap publik, namun tidak menutup kemungkinan adanya kendala yang peneliti temui pada observasi awal.

Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai Implementasi E-Hibah dan bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, peneliti menemukan informasi melalui hasil wawancara awal oleh pihak terkait yaitu dibagian Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dimana Biro Kesra merupakan pelaksana dari implementasi sistem informasi Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten berbasis online tersebut. Maka menjadi obyek utama peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten. Dalam observasi awal peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos Provinsi Banten. Biro Kesra hanya mengadakan sosialisasisatu kali pada Juni 2014 dan diadakan di KP3B, serta turut mengundang kurang lebih 100 kepala desa dari 4 (empat) Kota/Kabupaten di Provinsi Banten dari total 8 (delapan) Kota/Kabupaten di Banten, 4 (empat) Kota/Kabupaten yang turut di undang antaranya adalah Kota Cilegon, Kota Serang, Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang, sedangkan 4 (empat) lainnya yang tidak di undang adalah Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Menurut peneliti sosialisasi disini kurang karena sosialisasi yang diberikan seharusnya mencakup semua kalangan baik masyarakat, organisasi pemerintah, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan masyarakat kreatif.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal sebagai teknisi E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat 46

(empat puluh enam) tenaga kerja tetap tetapi hanya ada 1 (satu) tenaga ahli saja yang bisa mengoperasikan E-Hibah Bansos Banten.

Ketiga, kurangnya informasi yang *up to date* pada website E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten. Website Pemerintah Daerah ini dinyatakan tidak *up to date* karena tidak setiap hari, minggu, bahkan bulan memperbaharui informasi maupun tampilan pada website. Informasi ini tentunya menjadi penting untuk memberikan keterangan kepada para pengunjung maupun pengaju dana hibah, sayangnya website ini tidak memberikan update data,

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam Implementasi E- Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos Provinsi Banten.
2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal sebagai teknisi E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten.
3. Kurangnya informasi yang *up to date* pada website E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan membatasi ruang lingkup permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya fokus penelitian, maka peneliti akan memberikan batasan studi yang akan dilakukan, agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang terdapat dilapangan. Maka fokus penelitian adalah bagaimana Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :“Bagaimana Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian apapun, tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian tersebut. Hal ini sangat perlu agar dapat menjadi acuan bagi setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi target dari kegiatan penelitian. Maksud dari tujuan penelitian tersebut diantara lain adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

1.6 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
 - b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial Berbasis Online di Provinsi Banten.
2. Praktis
 - a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan tentang masalah dalam Implementasi Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial Berbasis Online di Provinsi Banten.
 - b. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah dapat mengetahui sejauh mana Implementasi Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial Berbasis Online di Provinsi Banten.

- c. Manfaat bagi masyarakat adalah dapat membangun kesadaran masyarakat bahwa peran masyarakat kepada pemerintah sangatlah penting guna membangun pemerintahan yang lebih baik lagi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta dapat dengan mudah dipahami maka penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan yang biasa digunakan sesuai petunjuk penulisan penelitian dari perguruan tinggi tempat penulis belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga menitik ke arah yang paling spesifik dan relevan dengan judul. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil penelitian dari yang sudah ada sebelumnya, hasil pengamatan dan wawancara terkait. Latar belakang masalah perlu diuraikan secara aktual dan logis.

1.2 Identifikasi Masalah

Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang muncul dari uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan.

1.3 Batasan Masalah

Menjelaskan keterbatasan kemampuan dan kemampuan berfikir peneliti terhadap permasalahan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari sejumlah masalah hasil identifikasi peneliti di atas, ditetapkan masalah yang paling penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pembatasan masalah mencakup fokus dan lokus penelitian, termasuk didalamnya membuat batasan definisi konsep dan operasional yang digunakan dalam penelitian.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan tujuan penelitian sejalan dengan isi dari tujuan penelitian.

1.6 Manfaat penelitian

Menguraikan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan dari hasil penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta dapat dengan mudah dipahami maka tugas Metode Penelitian Administrasi ini disusun berdasarkan ketentuan yang biasa digunakan sesuai petunjuk dari perguruan tinggi dimana penulis belajar.

BAB II Kajian Teori, Kerangka Pemikiran dan Asumsi Dasar Penelitian

2.1 Kajian Teori

Kajian Teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang variabel penelitian sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang referensi penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk memberi gambaran pada peneliti tentang penelitiannya.

2.3 Kerangka Pemikiran penelitian

Kerangka pemikiran penelitian menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikiran peneliti serta kaitan antar teori yang diteliti.

2.4 Asumsi Dasar

Asumsi dasar menjelaskan tentang perkiraan awal peneliti terhadap suatu masalah atau kajian yang diteliti. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, peneliti menggunakan presentase dalam asumsi dasar

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus penelitian

Menjelaskan tentang fokus yang diteliti oleh peneliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menjelaskan tentang teknik dalam mendapatkan atau mengumpulkan data. Disini teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi

3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang dipakai adalah peneliti itu sendiri.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian menjelaskan informan penelitian yang mana yang memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya yang sesuai dengan sifat data yang diteliti.

3.8 Uji Keabsahan Data

Menjelaskan pernyataan tentang pengujian keabsahan data. Pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek realibilitas yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

3.9 Jadwal penelitian

Menjelaskan tentang waktu penelitian dari pelaksanaan penelitian sampai penelitian tersebut berakhir.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

penjelasan mengenai obyek penelitian yang meliputi alokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel (dalam penelitian ini menggunakan istilah informan) yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisa data yang relevan.

4.3 Temuan Lapangan

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

4.4 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut dari lebih rinci terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara jelas, singkat dan juga mudah dipahami. Kesimpulan juga harus sejalan dengan permasalahan serta asumsi dasar penelitian.

5.2 Saran

Memiliki isi berupa tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Kajian Teori

Teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. *“Theory is a set of interrelated concepts, assumptions, and generalizations that systematically describes and explains regularities in behavior in organizations”*. Selanjutnya didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat di gunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat di kemukakan bahwa, teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. Menurut Sugiyono (2007:56), Teori berfungsi mengungkapkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan, juga sebagai stimulan dan panduan untuk mengembangkan pengetahuan. Hipotesis itu adalah merupakan pernyataan yang dibangun dengan teori untuk memprediksi hubungan antara konsep dalam suatu sistem.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori yaitu teori implementasi.

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Menurut Mazmanian dan Sabutier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan bahwa:

“Implementasi adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program itu dinyatakan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat”.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”

Menurut Rian Nugroho, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa :“implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Jadi, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Selanjutnya, studi implementasi menurut Jenkins dalam Parsons (2006:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana memungkinkan perubahan bisa dimunculkan dan juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka

bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang membuat mereka bertindak secara berbeda.

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky dalam Parsons (2006:468) mengungkapkan implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan. Dan menurut teori Cheema dan Rondinelli dalam Subarsono (2005:101) analisis implementasi program-program pemerintah yang bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni:

- a. kondisi lingkungan
- b. hubungan antar organisasi
- c. sumberdaya organisasi untuk implementasi program
- d. karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Eugene mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut:

“adalah cukup untuk membuat program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas.lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit

lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”(Agustino, 2006:152).

Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *implementation and Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai

“pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”(Agustino, 2006:153).

Sementara Grindle dalam Agustino merumuskan definisi yang berbeda dari beberapa definisi-definisi diatas, beliau memandang implementasi sebagai berikut:

“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *actions* program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”(Agustino, 2006:153)

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan minimal 4 hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang terjemahkan dalam proses implementasi
3. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut
4. Adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu, perlu di ingat bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat diketahui dan dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Udoji dalam Solichin (2007:59) yaitu:

“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”

Implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan

struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara mem*breakdown* (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

2.1.2 Konsep dan Teori *E-Government*

Konsep dasar *E – Government* Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Karena itu, dalam melihat *E-Government*, jangan terpaku oleh unsur 'e' - nya semata, tetapi yang terpenting adalah proses dan jalannya pemerintahan Melalui fasilitas internet atau media online. Terdapat dua hal utama dalam pengertian *E-Government*:

1. Penggunaan teknologi komunikasi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, dan

2. Tujuan pemanfaatannya agar kinerja pemerintahan dapat lebih efisien.

Ada banyak penjelesan mengenai tahapan–tahapan pengembangan e-government banyak pakar yang menunjukkan rumusan yang berlainan dan berbeda. Salah satunya tahap-tahap *e-government* dari ASPA (American Society for Public Administration) sebagai berikut:

1. *Emerging*: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan website sebagai sumber informasi alternatif.
2. *Enhanced*: sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga website menjadi lebih dinamis.
3. *Interactive*: ada fasilitas untuk mengunduh (men-download) formulir, interaksi melalui e-mail, dan menyediakan fitur bagi pengguna (user) untuk berinteraksi.
4. *Transactional*: pengguna dapat berinteraksi secara on line melalui fasilitas online payment.
5. *Seamless*: integrasi penuh layanan publik secara online.

Wujud nyata dari aplikasi *E-Government* yang telah umum dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs web

pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan *E-Government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pengembangan *E-Government* di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Tingkat 1 merupakan tingkat Persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik.
2. Tingkat 2 merupakan tingkat Pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat 3, tingkat Pemantapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers (G2C)*.

Pada situs web pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (KOMINFO) dalam buku panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Kriteria

yang diberikan merupakan gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar situs web pemerintah daerah yang terdiri dari:

1. Fungsi, aksesibilitas, kegunaan; Isi informasi situs web pemerintah daerah berorientasi pada keperluan masyarakat, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL (*Uniform Resource Locator*) yang tetap, sehingga mesin pencari (*search engine*) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan secara langsung.
3. Isi yang Efektif; Masyarakat pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs pemerintah daerah manapun.
4. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web pemerintah daerah dalam bentuk dua arah (interaktif). Situs web pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan mereka sendiri.
5. Evaluasi Kesuksesan; Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Artinya Situs-situs web pemerintah daerah

harus mengumpulkan, minimal statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjungi, halaman rujukan utama. Informasi tambahan mengenai siapayang menggunakan situs ini, tingkat transfer data. Evaluasi empat bulanan sangatlah direkomendasikan.

6. Kemudahan Menemukan Situs; pihak pemda harus mempromosikan situs webnya dan mendaftarkannya ke mesin pencari.

7. Pelayanan yang diatur dengan baik; Pihak pemda harus menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.

2.1.3 Pengertian *E-Government*

Electronic Government berasal dari *government* yang dalam bahasa Inggris berarti pemerintahan. Huruf e- di depan kata *government* yakni *electronic* seperti halnya dengan *electronic mail (e-mail)*, *electronic bussiness (e-bussines)*, dll. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. *Electronic government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan

efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemimpinan yang demokratis.

The World Bank Group mendefinisikan *E-Government* adalah ;

“Electronic Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.”

“Electronic Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan).”

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa:

“Electronic government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga-lembaga lain secara online”.

Menurut Carroll dalam Muluk (2006:100) sebagai berikut :

“E- Government merupakan penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi”.

Menurut Zweers dan Plangue mendefenisikan *electronic government* antara lain:

“Electronic government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah, tidak

berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan.”

Adapun *E-Government* menurut lainnya yaitu Millar dalam Andrianto (2007:45):

“Aplikasi prinsip-prinsip *e-business* terhadap proses pemerintahan. Dengan segala kelebihanannya internet sangat memenuhi syarat-syarat bagi wahana implementasi transparansi dan akuntabilitas publik dilingkungan pemerintahan.”

Menurut Janet Calow (2001) mendefinisikan ;

“*E-Government* bukanlah sebuah perubahan secara fundamental yang berjangka pendek pada pemerintahan dan pemerintahan dan bukan pula sebagai awal dari permulaan era industriasi. Artinya adalah bahwa *e-government* merupakan sebuah modernisasi pemanfaatan teknologi yang secara garis bukan sebuah perubahan yang sangat mendasar didalam sebuah tata pemerintahan yang dipastikan akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan pula membuktikan bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses pertumbuhan dan perubahan sosial.”

Teori *E-Government* menurut Indrajit dalam konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi. (Eko Indrajit, 2006:56):

“Suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dimana pemanfaatannya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.”

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard *JFK School of Government* (Eko Indrajit;2006), untuk menerapkan konsep – konsep digitalisasi pada sektor publik ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh yakni *Support, Capacity, dan Value*.

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politikus untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Yang dimaksud dengan dukungan disini bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ;

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government* , terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*. Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi. Baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program).

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasadiuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Menurut Indrajit (2002:68) pada tataran implementasi, terdapat tiga tingkatan *E-Government* yang dicerminkan oleh tampilan situs pemerintah sebagai berikut:

- a. *Publish*; merupakan implementasi *E-Government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas *publish* ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, di mana informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak

lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah *computer* atau *handphone* melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (*website*) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan.

- b. *Interact*; yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *publish*, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya).
- c. *Transact*; adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *Interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus ada sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

Sedangkan dalam buku *E-Government In Action* (2005:5) menguraikan *E-Government* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (*Shared goals*) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada *stakeholder* yang ada misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana *E-Government* tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *E-Government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian *E-Government* diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru;

b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

2.1.3.1 Tujuan Penerapan *E-Government*

Tujuan *electronic government* adalah untuk meningkatkan akses warga Negara terhadap jasa-jasa pelayanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menanganikeluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam buku III SANKRI (2004:342) dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud mencakup dua aktifitas yang berkaitan, yaitu (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah Negara.

2.1.3.2 Manfaat *E-Government*

Adapun manfaat dari penerapan E-government sebagai berikut ;

A. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industry) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

- B. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* dipemerintahan (bebas KKN)
- C. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
- D. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- E. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalandengan berbagai perubahan global dan trend yang ada, dan
- F. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2.1.3.3 Faktor-faktor Pendukung dalam Penerapan *Electronic Government*

Menurut Indrajit (2005), ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadibahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah lembaga dalam menerapkan *e-government* antara lain;

- a. Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan e-government.

b. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan IT oleh Aparat Pemerintah

Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu menjalankan sistem kinerja pemerintahannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa meskipun sudah banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak yang tidak dirawat sehingga menjadi rusak.

c. Sumber Daya Manusia

Subjek utama dalam inisiatif *E-government* adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat mempengaruhi performa penerapan *e-government*. Semakin tinggi tingkat *information technology literacy* SDM di pemerintah, semakin siap mereka untuk menerapkan *e-Government*.

d. Perangkat hukum

Karena konsep *e-government* sangat terkait dengan usaha penciptaan dan distribusi data/informasi dan hak cipta intelektual, maka perlu adanya perlindungan dari undang – undang atau hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *e-government* yang kondusif.

2.1.4 Pengertian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos)

2.1.4.1 Pengertian Hibah

Dalam website resmi E-hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten (www.ehibahbansos.bantenprov.co.id), hibah berasal dari bahasa arab yaitu huruf *haa* ' dikasrah dan *baa* 'difathah, adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, tanpa imbalan. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

A. Syarat-Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

1. Syarat-syarat penghibah

- a. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan.
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya

2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

a. Benar-benar ada

b. Harta yang bernilai

c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

d. Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.

- b. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

B. Macam-Macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.
3. Hibah utang, adalah hibah yang dilakukan oleh seseorang terhadap haknya berupa utang kepada orang lain selain orang yang berutang.

2.1.4.2 Pengertian Bantuan Sosial (Bansos)

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak

secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

A. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial, Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Selektif;
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. Bersifat sementara dan tidak menerus, kecuai dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. Sesuai tujuan penggunaan.

B. Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. Memiliki identitas yang jelas; dan
- b. Berdomisili dalam wilayah Provinsi Banten

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah baik Skripsi, Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti kaji dalam

penelitian ini berasal dari Skripsi. Dalam hal ini peneliti menuliskan beberapa peneliti terdahulu antara lain:

Skripsi milik Sri Purwandani Maesaroh Rihandoyo dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro dengan judul Analisis Penerapan *E-Government* Di Kabupaten Pati yang di buat pada tahun 2015. Penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati yang belum dapat berjalan secara maksimal telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan “Analisis Penerapan *E-Government* di Kabupaten Pati”. Permasalahan utama di dalam penelitian ini ialah : Bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati? Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan *electronic government* di Kabupaten Pati? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan tersebut. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut Harvard JFK School of Government antara lain *support*, *capacity*, dan *value*. Selain itu, juga menggunakan elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut Moon dalam Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari *willingness* dan *local culture*. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan *electronic government* di Kabupaten Pati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Government di Kabupaten Pati belum dapat berjalan secara maksimal karena terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi perkembangannya. Belum ada *support* didalam penerapan *e-Government* dengan tidak adanya *political will* dari pemerintah. *Capacity* yang sangat terbatas dengan sumber daya finansial, infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Tidak adanya *willingness* masyarakat Kabupaten Pati di dalam memanfaatkan fasilitas *e-Gov* serta adanya *local culture* dari masyarakat yang lebih menyukai cara manual daripada menggunakan media elektronik di dalam melakukan berbagai pekerjaan. Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kualitas pengembangan *e-Government* di Kabupaten Pati antara lain dengan mengadakan sosialisasi pemanfaatan IT di lingkungan pemerintahan secara berkala, mengadakan kerjasama yang lebih luas dengan sektor swasta, peningkatan jumlah sarana prasarana infrastruktur, peningkatan SDM pegawai melalui pelatihan, serta sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang keberadaan *e-Government* dan pemanfaatannya.

Skripsi selanjutnya adalah milik Nurul Wahida Safitri dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan judul Penerapan *E-Government* Di Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Kabupaten Pinrang tahun 2016. *E-Government* merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara

Pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Implementasi *E-Government* dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan data dan informasi berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (*transparency*) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Pinrang menghadirkan PINDU (Pusat pelayanan Informasi dan Pengaduan) sebagai wadah bagi masyarakat agar dapat dengan mudah menjangkau dan memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta berpartisipasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan public dengan menerapkan sistem berbasis on-line dan didukung perangkat teknologi modern. Kepentingan warga masyarakat pinrang akan disediakan dan dilayani dengan baik dengan cara yang sederhana, mudah dan efektif. Maka unit analisis pada penelitian kali ini yakni penerapan *E-Government* di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E-Government di Pusat Pelayanan informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang sudah cukup baik.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:60) kerangka berpikir adalah sketsa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya

dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penyusunan kerangka berfikir, peneliti menggunakan Konsep penerapan *E-Government* menurut Prof. Richardus Eko Indrajit melalui hasil kajian dan riset dari Harvard *JFK School of Government* (Eko Indrajit; 2006:56). Yaitu untuk menerapkan konsep – konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yakni *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Berikut paparannya :

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Yang dimaksud dengan dukungan disini bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian”

E-Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ;

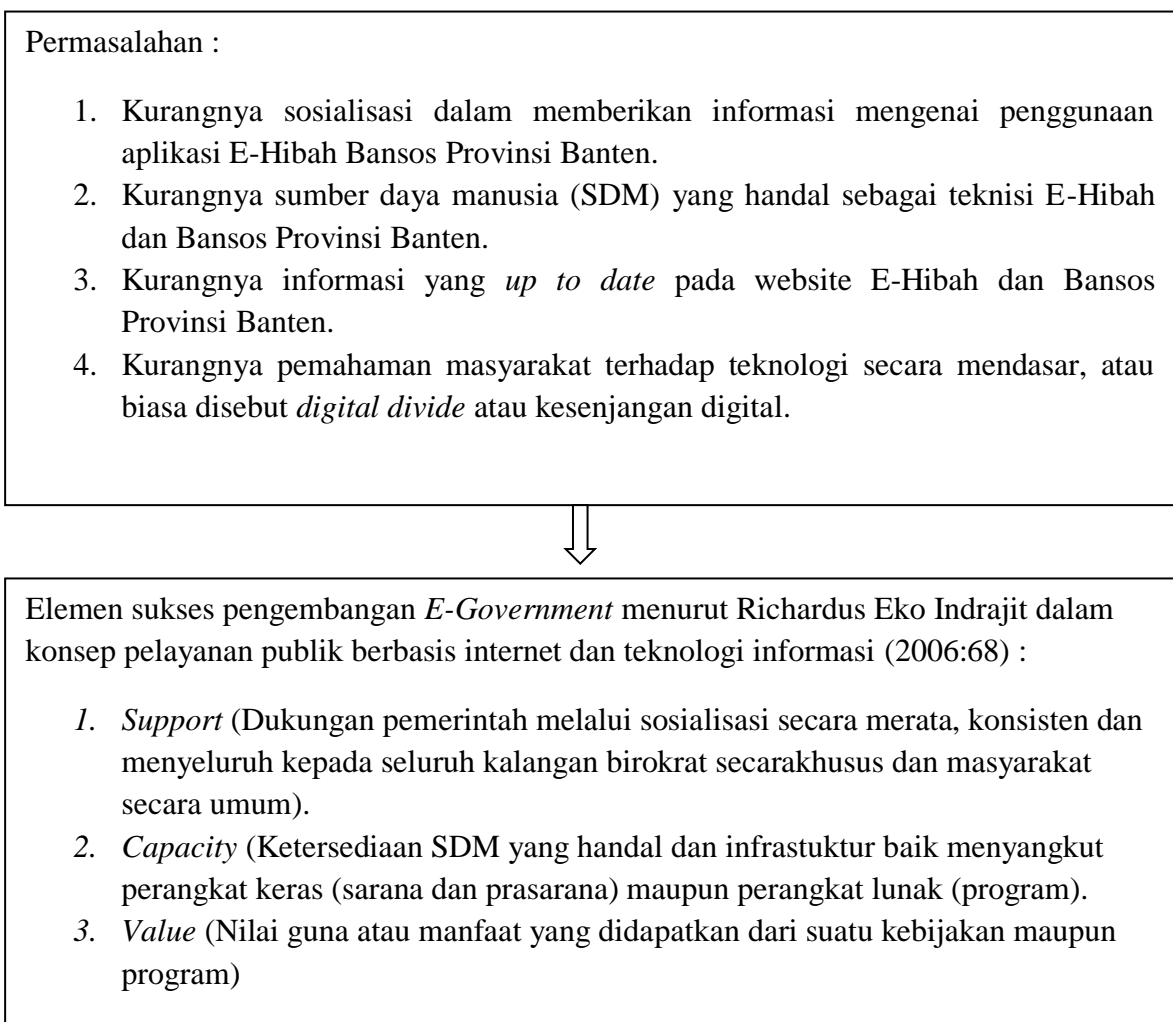
1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government* , terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*. Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi. Baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program).
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasakannya dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Dengan diadakannya pengukuran implementasi sesuai kajian teori yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan Pemerintah Provinsi Banten lebih optimal lagi dalam pengimplementasian E-hibah dan bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.3 dibawah ini ;

Tabel 2.3
Kerangka Berfikir





Implementasi E-Gov Hibah dan Bansos di Sekretariat
Daerah Provinsi Banten berjalan dengan efisien, efektif,
transparan dan akuntabel

Sumber ; Peneliti, 2018

2.4 Asumsi Dasar

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada Implementasi *E-Government* hibah dan bantuan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2015 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* serta diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, bahwa praktik *E-Government* hibah dan bansos di Biro

Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten belum terlaksana dengan baik maka proses pengimplementasian *E-Government* hibah dan bansosbansos di Biro Kesejahteraan Rakyat belum efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dilapangan, pelaksanaan kebijakan kurang didukung dengan karakteristik-karakteristik yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Jadi, implementasi *E-Government* hibah dan bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten belum dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Adapun penjelasan dari kerangka berpikir diatas yang memiliki asumsi bahwa implementasi *e-government* hibah dan bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat provinsi Banten belum berjalan optimal yaitu dilihat dari tiga elemen sukses penerepan *electronic government* menurut Prof. Richardus Eko indrajit, yaitu :

Elemen pertama, *support* yaitu merupakan suatu dukungan pemerintah berupa sosialisasi sebagai bentuk kesungguhan ingin tercapainya kinerja yang baik. Pada implementasi *E-government* hibah dan bantuan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten terlihat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten yaitu sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja baik sebelum diterapkan dan sampai sekarang hampir dua tahun lebih telah diterapkannya aplikasi pemerintah tersebut. Tepatnya pada Juni 2014 Biro Kesejahteraan Rakyat hanya mengundang kurang lebih 100 kepala desa dari 4 (empat) Kota/Kabupaten di Provinsi Banten dari total 8 (delapan) Kota/Kabupaten di Banten, 4 (empat) Kota/Kabupaten

yang turut diundang antaranya adalah Kota Cilegon, Kota Serang, Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang, sedangkan 4 (empat) lainnya yang tidak di undang adalah Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Menurut peneliti sosialisasi disini kurang karena sosialisasi yang diberikan seharusnya mencakup semua kalangan baik masyarakat, organisasi pemerintah, lembaga sosial masyarakat (LSM), dan masyarakat kreatif. Hal ini tidak cukup untuk mengembangkan informasinya kepada seluruh masyarakat apabila sosialisasinya hanya diberikan secara tidak menyeluruh dan tanpa dibarengi pelatihan bagi masyarakat yang kurang bahkan tidak mengerti penggunaan teknologi online.

Kedua, *capacity* yaitu kemampuan atau ketersediaan pemerintah baik dari ketersediaan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang cukup. Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi. Baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program). Pada elemen ini terlihat kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal, kurangnya informasi yang *up to date* pada website, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi secara mendasar, atau biasa disebut *digital divide* atau kesenjangan digital. Hal ini yang menyebabkan implementasi tidak berjalan secara optimal.

Ketiga, *value* yaitu nilai guna atau manfaat dari diterapkannya E-hibah dan Bansos ini. Dari diterapkannya kebijakan ini harus adanya nilai serta manfaat bagi seluruh kalangan baik pemerintah, seluruh masyarakat, dan organisasi sebagai bentuk

keberhasilan pemerintahan yang baik. Namun, suatu kebijakan tidak akan ada gunanya apabila tidak ada manfaat dari penerapan kebijakan tersebut. Penerepan E-Hibah Bansos di Provinsi Banten itu sendiri masih sedikit manfaat yang terlihat, karena belum terlihat perkembangan yang signifikan setelah diterapkannya website pemerintah daerah tersebut. Terhitung 40 (empat puluh) calon pendaftar penerima Bansos tidak terencana pada Tahun 2015-2016. Dan 10 (sepuluh) calon pendaftar penerima Bansos pada Tahun 2017. Disini terlihat pengguna aplikasi E-Hibah Bansos Provinsi Banten masih sedikit dan tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat. Adapun unsur yang penting agar tercapainya manfaat aplikasi Pemerintah Daerah ini yaitu dibutuhkan komitmen pimpinan, komitmen pimpinan disini yaitu apabila ingin diberlakukannya kebijakan baru, program baru, ataupun aplikasi baru dari pemerintah guna meningkatkan kinerja pemerintah yaitu harus dibarengi oleh konsistensi kebijakan itu sendiri. Apabila sudah menggunakan sistem online untuk mempermudah kinerja pemerintah, jangan lagi menggunakan cara manual supaya terciptanya keserempakan dalam organisasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiono dalam bukunya *Metode Penelitian Administrasi*, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai Implementasi sistem informasi hibah dan bansos berbasis online di Provinsi Banten, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Fokus penelitian metode kualitatif bersifat *holistic* yang meliputi ; tempat, *actor* dan aktifitas. Tempat penelitian yang peneliti ambil yaitu di salah satu instansi pemerintah Provinsi Banten yang berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang-Banten. Aktornya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai penerima wewenang pemerintah dan Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana pengelola E-hibah Bansos Provinsi Banten.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa SKPD terkait di Provinsi Banten. Dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan *E-Government* Hibah dan Bansos di Provinsi Banten.
2. DPPKD Provinsi Banten sebagai instansi pengelolaan dana Hibah dan Bansos di Provinsi Banten.
3. Masyarakat, Lembaga sosial masyarakat (LSM), organisasi pemerintah, serta masyarakat kreatif lainnya sebagai bagian dari stakeholder dalam program Sistem Informasi Hibah dan Bansos berbasis Online di Provinsi Banten yang memperhatikan pelaksanaan program kebijakan.

3.4 Variabel Penelitian/ Fenomena yang diamati

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep dari objek penelitian yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan konsep kerangka berpikir penelitian itu sendiri. Objek penelitian ini adalah Provinsi Banten. Definisi konsep terkait implementasi penerapan *E-Government* dalam upayanya memantapkan dan mengembangkan sistem informasi pelayanan hibah dan bansos berbasis online, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah disini tidak lagi menjalankan peran dominan dalam pemerintahan, namun dalam hal ini turut melibatkan masyarakat agar ikut andil secara langsung sebagai bagian dari pelaksanaan program *E-Government* hibah dan bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau objek penelitian dalam rincian yang terukur berdasarkan indikator penelitian. Definisi operasional penelitian menjabarkan pedoman wawancara penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori *E-Government* menurut Prof. Richardus Eko indrajit dalam konsep pelayanan publik berbasis internet dan

teknologi informasi.(Eko Indrajit, 2006): merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dimana pemanfaatannya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK *School of Government*(Indrajit, 2006:56) , untuk menerapkan konsep – konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh - sungguh,yakni *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

Dalam implementasi *E-Government* hibah dan bantuan sosial diBiro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan dari E-Hibah dan Bansos itu sendiri di Provinsi Banten.Elemen – elemen penting berdasarkan teori Penerapan *E-Government* dalam Indrajit (2006:56) adalah:

1. Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *E-Government*. Yang dimaksud dengan dukungan disini bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh

kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni ;

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government* , terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *E-Government*. Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi. Baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program).
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. Value

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasadiuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah

kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai Implementasi *E-Government* Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan *focus* penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Dalam hal instrumen, kualitatif menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2012:223) menyatakan yaitu:

”Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, dalam penelitian kualitatif permasalahan yang ada di lapangan awalnya belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan

dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menerapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2012:59-60).

Sebagai *human instrument*, peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil dilapangan. Dalam proses penyusunan data pada penelitian Implementasi *E-Government* Hibah dan Bantuan Sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Banten, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan, maupun melalui observasi atau pengamatan tidak berperanserta di tempat yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan Implementasi *E-Government* Hibah dan Bantuan Sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2012:224). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1) Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian, sesuai dengan yang diutarakan oleh Usman (2000: 52); observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari hasil pengamatan itu dilakukan pencatatan mengenai objek yang diamati.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berpartisipatif, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu pelaksanaan implementasi sistem informasi hibah dan bantuan sosial berbasis online di Provinsi Banten ini. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi objek penelitian.

2) Wawancara

Menurut Sugiyono (2007:72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun tetap terkait dengan

pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan dibahas dalam fokus penelitian.

Dalam sebuah wawancara tentu dibutuhkan suatu pedoman. Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.5
Pedoman Wawancara

Kajian	Pertanyaan	Informan
<p>1. <i>Support</i> (Keinginan dan dukungan pemerintah melalui sosialisasi secara merata, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum)</p>	<p>A) Apakah sudah dilakukan sosialisasi terkait diberlakukannya website resmi E-Hibah Bansos Banten</p> <p>B) Apakah sosialisasi sudah dilakukan secara merata kepada masyarakat, organisasi pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat kreatif ?</p> <p>C) Adakah pelatihan cara mengoperasikan website tersebut saat sosialisasi berlangsung?</p> <p>D) Siapakah yang berwenang menjalankan website E-Hibah Bansos Banten ini ?</p> <p>E) Berapakah jumlah tenaga kerja di Biro Kesra ? Dan berapa jumlah teknisi yang mengoperasikan website E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?</p>	<p>1. Staff Bagian Pelaksana Biro Kesra Provinsi Banten</p> <p>2. Staff Bagian Penerbitan Teknologi Dan Informasi (KOMINFO)</p> <p>3. Staff Tata Usaha Biro Dinas Sosial</p>

<p>2. <i>Capacity</i> (Ketersediaan SDM yang handal, infrastuktur baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program), dan <i>financial</i>)</p>	<p>A) Apakah infrastruktur di Biro Kesra sudah memadai?</p> <p>B) Berapakah dana yang dikeluarkan untuk Hibah dan Bansos Provinsi Banten?</p>	<p>1. Staff Bagian Pelaksana Biro Kesra Provinsi Banten.</p> <p>2. Staff Bagian Penerbitan Teknologi Dan Informasi (KOMINFO)</p> <p>3. Staff Tata Usaha Biro Dinas Sosial</p> <p>4. Staff bidang Aset DPPKAD Provinsi Banten</p>
<p>3. <i>Value</i> (Nilai guna atau manfaat yang didapatkan dari suatu kebijakan maupun program)</p>	<p>A) Adakah manfaat dari diterapkannya E-Hibah Bansos Banten ini?</p>	<p>1. Masyarakat</p>

Sumber: Peneliti, 2018

3) Studi kepustakaan

Istilah studi kepustakaan digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli, diantaranya yang dikenal adalah: kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut, pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk

mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, buku-buku, maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang dibutuhkan terkait dengan implementasi Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

4) Studi dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2009:240).Studi dokumentasi menurut Soehartono (2004:70) merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang ditujukan kepada subyek penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam penelitian. Menurut Bungin dalam Penelitian Kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam Implementasi *E-Government* Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.

Tabel 3.6
Informan Penelitian

Jenis Informan	Kode	Informan	Keterangan
Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten (I.1)	I.1	Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Provinsi Banten (I.2)	I.2	Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)	<i>key Informan</i>
Bidang AsetDPPKAD Provinsi Banten (I.3)	I.3	Staff Bidang AsetDPPKAD Provinsi Banten	<i>Secondary Informan</i>
Staff Tata Usaha Biro Dinas Sosial (I.4)	I.4	Staff Tata Usaha Biro Dinas Sosial	<i>Secondary Informan</i>
Masyarakat (I.5)	I.5-1	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten	<i>Secondary Informan</i>
Masyarakat	I.5-2	Masyarakat umum	<i>Secondary</i>

(I.6)			<i>Informan</i>
--------	--	--	-----------------

Sumber: Peneliti, 2018

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai dilapangan.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan Irawan dalam bukunya Metodologi Penelitian Administrasi (2005:27) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan yang terakhir yaitu penyimpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*) dapat diartikan bahwa kesimpulannya penelitian adalah dengan cara mengabstaraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai

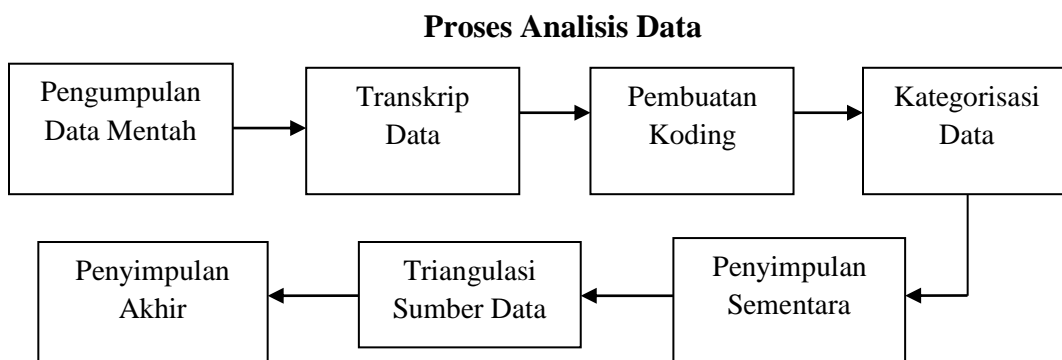
tingkat “titik jenuh” atau *reliable* (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang peneliti cari).

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah (Moleong, 2005: 248) :

“Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Dari penjelasan di atas maka proses analisis data merupakan pemilihan data yang didapatkan untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian berlangsung yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Prasetya Irawan, yaitu sebagai berikut.

Gambar 3.7



Sumber: Irawan, Prasetya. 2005:5

Dari gambar 3.7 di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis data yaitu :

1) Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan, seperti kamera dan tape recorder. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti itu sendiri.

2) Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur adukkannya dengan pikiran peneliti.

3) Pembuatan Koding

Di tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip. Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode.

4) Kategorisasi Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

5) Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.

6) Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Dan dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa orang yang merupakan partisipan dari program E-hibah dan Bantuan Sosial.

7) Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan.

Setelah dilakukan analisis data, perlu dilakukan uji keabsahan data atau bisa juga disebut uji validitas dan reliabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal adalah penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran / pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti pun melakukan member check, yaitu proses pengecekan data-data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

3.8 Jadwal Penelitian

Disetiap penelitian, tentulah harus ada catatan waktu aktifitas yang dilakukan oleh peneliti sehingga pembaca mengetahui kapan penelitian ini di mulai dan berakhir. Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian implementasi sistem informasi hibah dan bantuan sosial berbasis online di Provinsi Banten.

Tabel 3.8
Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Waktu																								
		Ag t 20 16	Sep 2016				Juni 2017				Nov 2017				Jan 2018				April 2018				Juli 2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pengajuan Judul																									
2	Perijinan dan Observasi Awal																									
3	Penyusunan Proposal Skripsi																									
4	Seminar Proposal dan Revisi Proposal Skripsi																									
5	Pengumpulan Data Mentah																									
6	Transkrip Data																									
7.	Pembuatan Koding dan Kategorisasi Data																									
8	Penyimpulan Sementara, Triangulasi, dan Penyimpulan Akhir																									
9	Sidang Skripsi																									
10	Revisi Skripsi																									

Sumber : Peneliti, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum kota Serang. Gambaran umum Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tepatnya di kota Serang sebagai daerah pusat pemerintahan provinsi Banten. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

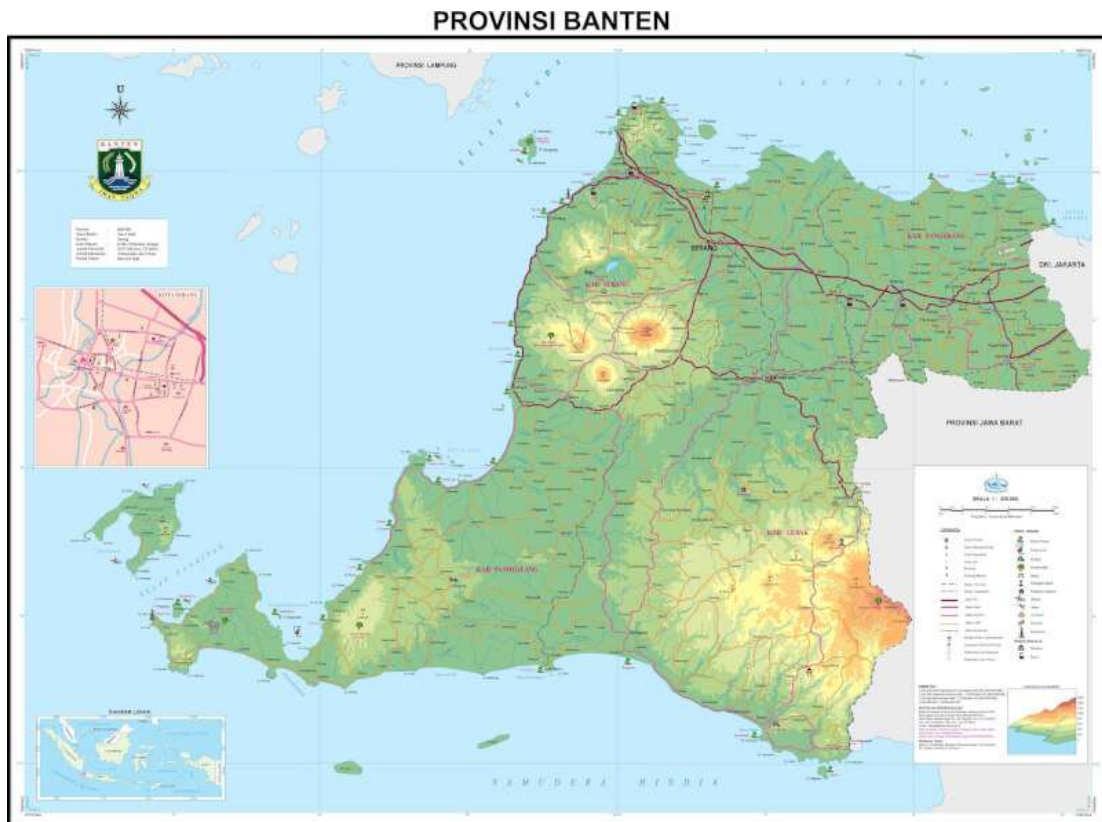
4.1.1 Gambaran Provinsi Banten

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000, dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Provinsi ini memiliki delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang ditambah Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang selatan.

1. Gambaran Umum Provinsi Banten

Gambar 4.1

Peta Provinsi Banten



Wilayah Banten berada pada batas astronomi $5^{\circ} 7' 50''$ – $7^{\circ} 1' 11''$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 1' 11''$ – $106^{\circ} 7' 12''$ Bujur Timur, berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km² . Secara wilayah pemerintahan

Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa.

Provinsi Banten mempunyai batas wilayah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Sunda

Wilayah laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial, Selat Sunda merupakan salah satu jalur yang dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia, Selandia Baru, dengan kawasan Asia Tenggara misalnya Thailand, Malaysia dan Singapura.

Disamping itu Banten merupakan jalur perlintasan/penghubung dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan maka wilayah Banten terutama Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan wilayah penyangga bagi Ibukota Negara. Secara ekonomi wilayah Banten mempunyai banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan sangat mungkin menjadi pelabuhan alternatif dari Singapura.

Kondisi topografi Banten adalah sebagai berikut :

- Wilayah datar (kemiringan 0 – 2 %) seluas 574.090 Ha
- Wilayah bergelombang (kemiringan 2 – 15%) seluas 186.320 Ha
- Wilayah curam (kemiringan 15 – 40%) seluas 118.470,50 Ha

2. Topografi.

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal. Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah.

Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan.

Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

3. Hidrologi dan Klimatologi.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

1. DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);

2. DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
3. DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
4. DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
5. DAS Teluklada, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
6. DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas kabupaten maupun kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

4. Kemiringan

Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

Dataran yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 0 – 15%, sehingga menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dengan nilai

kemiringan ini tidak diperlukan banyak perlakuan khusus terhadap lahan yang akan dibangun untuk proses prakonstruksi. Lahan dengan kemiringan ini biasanya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak;

Perbukitan landai-sedang (kemiringan $< 15\%$ dengan tekstrur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang; Daerah perbukitan terjal (kemiringan $< 25\%$) terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang. Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan.

5. Jenis Tanah

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu: (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing-masing tipe tanah ini di wilayah Propinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-

masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. aluvial pantai dan sungai;

2. latosol;

3. podsolik merah kuning;

4. regosol;

5. andosol;

6. brownforest;

7. glei.

6. Geologi

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia Miosen akhir, batumannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasiran, lempung pasiran, batu gamping kokina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan Alluvium yang berumur mulai Miosen awal hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen. Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesiot sampai basal. Tuf Cikasungka berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuarter. Pada peta lembar Leuwidamar disajikan pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Ologo Miosen terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuarter. Batuan endapan termuda adalah aluivium dan endapan pantai yang berupa Kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.¹

¹Sumber : Dokumen RPJM Prov. Banten Tahun 2007 – 2012

4.1.2 Visi Misi Provinsi Banten 2017-2022²

Visi

“ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “

Misi

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4.1.3 Gambaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Sekretariat daerah (disingkat setda) Provinsi Banten adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah, di Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdapat beberapa Organisasi

²www.BantenProv.go.id (Website Resmi Pemerintahan Provinsi Banten)

Perangkat Daerah (OPD) yang dibagi kedalam beberapa kualifikasi, OPD yang di maksud ialah:³

1. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
2. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
3. Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4. Biro Perekonomian
5. Biro Pemerintahan
6. Biro Hukum
7. Biro Organisasi
8. Biro Kesejahteraan Rakyat
9. Biro Umum

4.1.4 Gambaran Umum Biro Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, “Sekretariat Daerah sebagai pelaksana tugas langsung yang diberikan oleh Gubernur, karena sekretariat daerah berkedudukan dibawah Gubernur”.Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari Administrasi umum dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.Sedangkan Fungsi Biro Kesejahteraan rakyat sebagaimana menjadi satuan kerja dari asisten daerah pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang terdapat

³Idem

didalam sekretariat daerah yaitu sebagai penerima dan pelaksana wewenang dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sekretariat daerah Provinsi Banten.

4.1.4.1Kondisi Geografis dan Demorafis

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 Km² yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan.

Batas Administratif Kota Serang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu ,Kabupaten Serang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang; dan
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang

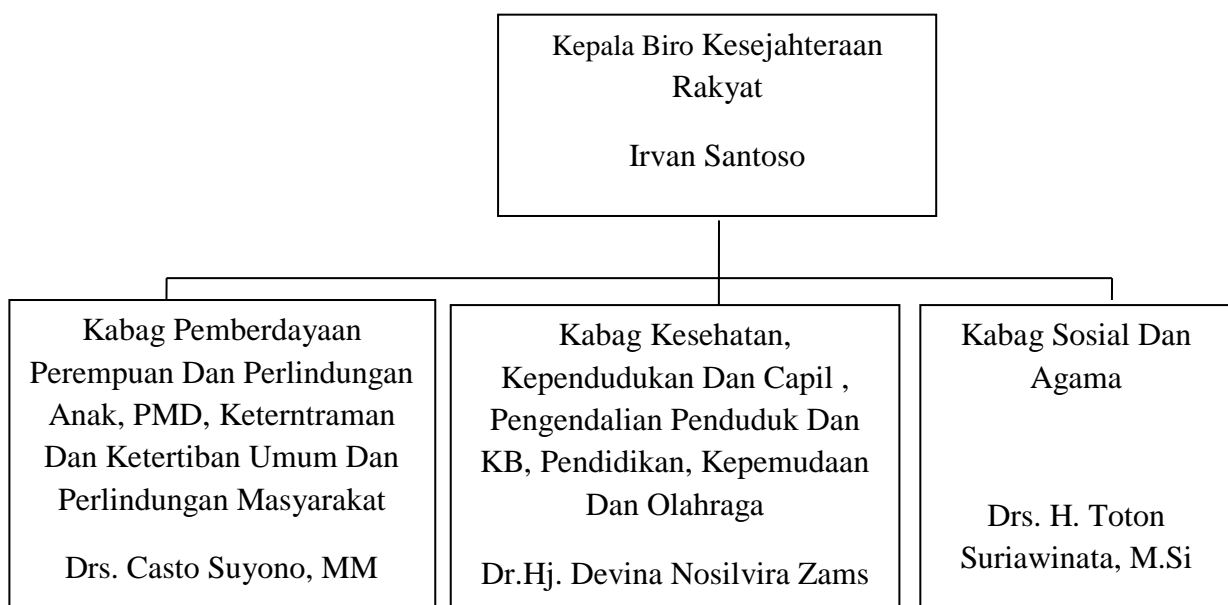
Dengan demikian, Kota Serang merupakan wilayah penting bagi pusat segala kegiatan pemerintahan provinsi Banten. Sehingga sangat pentingnya menelaah segala aktivitas pemerintahan guna mengetahui apakah pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan berjalan dengan baik atau memiliki hambatan yang berarti. Sekretariat daerah provinsi Banten memiliki bagan struktur organisasi penting disetiap divisinya, serta memiliki tugas pokok yang berbeda disesuaikan dengan fungsi divisi masing – masing.

4.1.4.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat daerah provinsi Banten:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten



Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat, 2018

Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten memiliki 3 Divisi yang masing-masing memiliki tupoksi untuk menangani berbagai keperluan masyarakat agar tercapainya tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat, terutama dalam terjaminnya mutu kehidupan masyarakat itu sendiri. Dapat dilihat dari ketiga divisi, Biro Kesejahteraan Rakyat menangani masalah yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta kebebasan beragama.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub bagian dari biro kesra ialah :

Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi, evaluasi, perumusan dan fasilitasi kebijakan dibidang kesehatan dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan Perumusan dan fasilitasi kebijakan dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan dan keluarga berencana;

- e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan dibidang kesehatan dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas;

Sub-Bagian Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub-Bagian Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dibidang kesehatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang kesehatan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi dibidang kesehatan;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinas, evaluasi dan perumusan kebijakan

fasilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Fasilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi penanganan masalah sosial;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai kejuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sub-Bagian Fasilitasi Kelembagaan dan Institusi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Fasilitasi Sosial melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub-Bagian Fasilitasi Kelembagaan dan Institusi Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan informasi fasilitasi kelembagaan dan institusi masyarakat;
- f. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Pendidikan dan Keagamaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat melaksanakan koordinasi, evaluasi dan perumusan Kebijakan fasilitasi pendidikan dan agama. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bagian Pendidikan dan Keagamaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi keagamaan, kepemudaan dan olahraga, pendidikan dan kebudayaan;
- c. Penyiapan bahan perumusan koordinasi fasilitasi keagamaan, kepemudaan dan olahraga, pendidikan dan kebudayaan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi keagamaan, kepemudaan, dan olahraga, pendidikan dan kebudayaan;

- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.4.3 Visi dan Misi

a. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan kondisi wilayah, masyarakat, tugas pokok dan fungsi yang disandang :”**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**”.

Selanjutnya sebagai upaya dalam mewujudkan Visi tersebut penjabarannya tertuang dalam Misi dari pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel, bersih dan berwibawa.
2. Menciptakan kualitas pelayanan publik dengan berpedoman pada ketaatan dan supremasi hukum.

b. MISI

Upaya-upaya dalam mewujudkan Visi tersebut penjabarannya tertuang dalam Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4.1.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dijelaskan bahwa “Sekretariat Daerah sebagai pelaksana tugas langsung yang diberikan oleh Gubernur, karena sekretariat daerah berkedudukan dibawah Gubernur”.Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian dari Administrasi umum dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Banten.Sedangkan Fungsi Biro Kesejahteraan rakyat sebagaimana menjadi satuan kerja dari asisten daerah pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang terdapat didalam sekretariat daerah yaitu sebagai penerima dan pelaksana wewenang dari kementrian informasi dan komunikasi sekretariat daerah. Adapun tugas pokok Biro Kesra sebagai berikut ;

1. Menyimpan bahan perumusan-perumusan kebijakan dibidang social kesejahteraan rakyat setda bahan pembinaan mental spiritual masyarakat;
2. Menyimpan bahan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual masyarakat;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan pembinaan mental spiritual masyarakat; dan

5. Pelaksanaan Ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Kesra Setda Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya;
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Perumusan dan perencanaan kebijakan umum dibidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
4. Perumusan dan perencanaan kebijakan umum dibidang Fasilitas Sosial;
5. Perumusan dan perencanaan kebijakan umum dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Perumusan dan perencanaan kebijakan umum dibidang Pendidikan dan Agama;
7. Pengelola Urusan Administrasi Ketatausahaan Biro;
8. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dari tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Bagian sebagai berikut: Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang

pendidikan, pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Melaksanakan perintah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
5. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
6. Mengoordinasikan peningkatan kehidupan sosial dan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin;

7. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Biro yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol;
8. Penyimpanan arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan kesbangpol serta mengoordinir tugas-tugas ketatausahaan Biro;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Agama dan Haji mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang agama dan haji serta melaksanakan tugas yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Agama dan Haji mempunyai fungsi :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian Agama dan Haji;
2. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi PNS dan masyarakat;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) mulai Tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Nasional dan Internasional;

4. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan, seni dan budaya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pondok Pesantren (Pontren), Pendidikan Keagamaan dan BAZDA;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan sosial dan petunjuk teknis peningkatan kesejahteraan sosial;

2. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan ketenagakerjaan dan petunjuk teknis peningkatan ketenagakerjaan;
3. Menyiapkan bahan-bahan, mengumpulkan peraturan perundang-undangan untuk pembinaan masyarakat, transmigrasi dan petunjuk teknis peningkatan pelayanan penanganan kesejahteraan masyarakat dan transmigrasi;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
5. Membuat konsep pembinaan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang kesehatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan KB sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

1. Mengumpulkan data dan melakukan analisa dalam rangka penyiapan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pemberdayaan perempuan, penyusunan program pemberdayaan dalam rangka penghormatan martabat dan HAM bagi pemberdayaan perempuan;

2. Menyusun perencanaan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan perempuan, organisasinya dan aktifitas lanjut;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan pemberdayaan perempuan;
4. Mengevaluasi kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program serta kajian sebagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan termasuk pelaporan;
5. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan pemberdayaan perempuan;
6. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan yang meliputi Kab/Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana;
7. Menyusun rencana pelatihan bidang pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) serta pengarusutamaan gender diseluruh sektor pembangunan;
8. Melaksanakan koordinasi, keterpaduan dan penyusunan rencana pengendalian;
9. Evaluasi serta monitoring dan pelaporan;
10. Melaksanakan koordinasi, keterpaduan kegiatan Instansi Pemerintah Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dalam pembangunan pemberdayaan perempuan;
11. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan;

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja;
13. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan manajemen gender;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Deskripsi Data

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata-kata maupun tindakan. Data-data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan kajian elemen sukses pengembangan *E-Government* menurut Richardus Eko Indrajit dalam konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi (2006:68), diantaranya yaitu: *support, capacity, value*.

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan Prasetya Irawan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya yaitu pada Bab 3 (Metodologi Penelitian), Irawan menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, diantaranya pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding,

kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi sumber data dan penyimpulan akhir.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya (*verbatim*). Langkah ke dua yaitu transkrip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.

Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut:

1. Kode Q menunjukkan item pertanyaan
2. Kode A menunjukkan item jawaban
3. Kode I₁ menunjukkan informan pihak Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat
4. Kode I₂ menunjukkan informan pihak Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)
5. Kode I₃ menunjukkan informan pihak Staff DPPKD Provinsi Banten
6. Kode I₄ menunjukkan informan pihak Staff Dinas Sosial
7. Kode I₅ menunjukkan informan pihak Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten

8. Kode I₆ menunjukkan informan pihak Masyarakat umum Daerah Kota Cilegon (Ciwedus), Kota Serang (Cipocok Jaya), Kota Pandeglang (Gunung Putri), Kota Tangerang (Batu Ceper)

Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun masih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses *check and recheck* (triangulasi sumber data) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan di setiap penambahan data hanya akan memunculkan ketumpang tindihan.

4.2.1 Informan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi *E-government* hibah dan bantuan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat daerah Provinsi Banten. Berdasarkan peran dan fungsi informan tersebut, informan dalam penelitian ini berjumlah 5 kategori informan, yaitu dari pihak Biro Kesra, Kominfo, DPPKAD, Dinas Sosial, dan Masyarakat.

Tabel 4.2.1

Daftar Informan

No	Kode	Nama Informan	Keterangan
1.	I ₁	Iman Sentosa, S.H	Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat
2.	I ₂	Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si	Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)
3.	I ₃	Endad Heryanto, S.E., M.Si	Staff DPPKD Provinsi Banten
4.	I ₄	Desinawati, SKM., M.Si	Staff Dinas Sosial
5.	I ₅₋₁	Saiful	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten
6	I ₅₋₂	Siti Sadiyah	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten
7	I ₅₋₃	Nuryamah	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten
8	I ₅₋₄	Encih	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten
9	I ₅₋₅	Rukmi	Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

10	I ₆₋₁	Entus Hariyadi	Masyarakat Kota Cilegon (Ciwedus)
11	I ₆₋₂	Khalidah	Masyarakat Kota Serang (Cipocok Jaya)
12	I ₆₋₃	Risma Maulina	Masyarakat Kota Pandeglang (Gunung Putri)
13	I ₆₋₄	Nurul Amanah	Masyarakat Kota Tangerang (Batu Ceper).

Sumber : Peneliti 2018

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai implementasi *E-Government* hibah dan bantuan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten.

Website E-Hibah bansos ini sudah berumur lebih dari satu tahun, dan sudah banyak pendaftar yang mendaftarkan diri untuk meminta bantuan untuk

1. *Support*

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar

menerapkan konsep *E-Government*, bukan hanyasekedar mengikuti *trend* atau justru menentang inisiatif yang berkaitandengan prinsip-prinsip *E-Government*. Yang dimaksud dengan dukungandisini bukan hanya omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yangdiharapkan adalah dalam bentuk disosialisasikannya konsep *E-Government* secara merata, kontinyu,konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secarakhusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.Dari kajian *support* ini, peneliti menilai bahwa masih kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi *E-Hibah Bansos Provinsi Banten*.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Iman Sentosa (I.₁) :

“Pihak Biro Kesra Sendiri mengadakan sosialisasi satu kali pada awal juni 2014 neng.Pesertanya yang kita undang kurang lebih 100 kepala Desa, ada dari tiap Kotanya seperti Kota Cilegon, Serang, Pandeglang, Tangerang. Seperti yang saya kasih tahu ke neng datanya diemail itu daerah – daerahnya sudah disebutkan disitu ya diliat saja.”. (wawancara dengan Bapak Iman Sentosa, Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 17 April 2018, pukul 10.30)

Dari penuturan Bapak Iman Sentosa didapatkan infromasi bahwa sosialiasi baru terlaksana satu kali saja, padahal sosialiasi sangat penting untuk membuat perubahan pengetahuan masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu.Sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali ini seharusnya dapat memberikan infromasi secara utuh agar tidak ada keraguan di masyarakat. Banyaknya masyarakat Banten di kota maupun kabupaten tentu menjadi perhatian pemeintah agar program dapat berjalan

efektif, maka Biro Kesejahteraan Rakyat mengundang para kepala desa agar dapat menyentuh langsung masyarakat, karena tidak semua masyarakat dapat di jangkau dengan media informasi. Kepala desa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah provinsi Banten untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat di desanya masing – masing. Harapannya agar masyarakat mengetahui adanya program bantuan pemerintah dengan menggunakan website *E-Hibah* Bansos ini. Berikut daftar Nama Desa di Banten yang diundang untuk sosialisasi :

Tabel 4.3

Daftar Nama Desa di Banten yang diundang sosialisasi

No	Nama Kota/kabupaten	Nama Desa
1	KOTA SERANG	Cipocok Jaya, Banjaragung, Banjarsari, Panancangan, Karundang, Tembong, Dalung, Gelam, ,Cilaku, Cipete, Curug, Curugmanis, Kamanisan, Pancalaksana, Sukajaya, Sukalaksana, Sukawana, Tinggar, Banten, Bendung, Kasemen, Kasunyatan, Kilasah, Margaluyu, Mesjid Priyayi, Pulo Panjang, Sawah Luhur, Terumbu, Warung Jawud, Cimuncang, Unyur, Kotabaru, Lopang, Kagungan, Lontarbaru, Kaligandu, Serang, Sukawana, Cipare, Sumurpecung, Terondol, Cilowong, Drangong.
2	KABUPATEN PANDEGLANG	Angsana, Cikayas, Cipinang, Kadubadak, Karangsari, Kramat manik, Padaherang, Padamulya, Sumurlaban, Bandung, Banjar, Cibeureum, Cibodas, Citalahab, Gunung putri, Kadubale, Kadulimus, Kadumaneuh, Mogana, Pasirawi, Banyumas, Cahaya mekar, Cijakan, Citumenggung, Geredug, Manggung jaya, Mekarsari, Cadasari, Ciinjuk, Cikentrung, Kaduella, Kaduengang, Kaungcaang, Koranji Kurung dahu, Pasir peuteuy, Tanagara, Tapos

3	KOTA CILEGON	Kedaleman, Cibeber, Kalitimbang, Karangasem, Bulakan, Cikerai, Ciwaduk, Ketileng, Bendungan, Ciwedus, Bagendung, Citangkil, Tamanbaru, Kebonsari, Lebakdenok, Samangraya, Warnasari, Deringo, BanjarNegara, Kubangsari, Tegalratu, Kepuh, Randakari, Gunungsugih, Gerogol / Grogol, Kotasari.
4	KOTA TANGERANG	Batu Jaya, Batu Sari, Batu Ceper, Kebon Besar, Poris Gaga, Poris Gaga Baru, Poris Jaya, Belendung, Jurumudi, Jurumudi Baru, Benda, Pajang, Jatiuwung, Cibodas, Cibodas Baru, Cibodas Sari, Uwung Jaya, Panunggangan Barat, Sudimara Barat, Sudimara Jaya, Sudimara Selatan, Sudimara Timur, Tajur, Paninggilan.

Data pada Tabel 4.3 merupakan tabel daftar nama desa di Provinsi Banten yang turut diundang oleh pemerintah daerah provinsi Banten untuk diberikan sosialisasi mengenai penerapan Website E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten. Berdasarkan temuan observasi awal tersebut peneliti mengindikasikan bahwa ditemukan adanya masalah dalam proses implementasi dalam kebijakan Program Hibah dan Bantuan Sosial Berbasis Online di Provinsi Banten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten**”.

Begitu juga dengan pernyataan Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO) (I₂) :

“Sosialisasi itu yang mengadakan dari Biro Kesra, kita pihak KOMINFO hanya memberi wewenang dari pusat ke Biro Kesra saja, kita hanya ikut mengawasi dan membantu seperlunya saja. Tapi yang menjalankan website dan termasuk Sosialisasinya urusan Biro Kesra. Ada sosialisasinya disini (KP3B), mengundang perwakilan kepala desa. Kita juga mengundang 100 kepala desa se-provinsi Banten”. (wawancara dengan Ibu Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si, Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO) Provinsi Banten, 17 April 2018 pukul 13.15)

Penyebaran informasi website E-Hibah Bansos Banten ini penting, karena banyaknya dana hibah dan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah menjadi kewajiban untuk dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam program kesejahteraan sosial, Karena sosialisasi merupakan gerbang pertama untuk memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat agar mempermudah dapat mengajukan bantuan dengan menggunakan website E-Hibah ini.

Adapun tanggapan dari staff bagian tata usaha biro Dinas Sosial, Desinawati(I₄)

“Bukan Dinas Sosial yang mengoperasikan website E-Hibah Bansos Banten, bagian Biro Kesra untuk pendaftaran onlinenya, kita Dinas Sosial dan dinas lainnya bagian merealisasikan bantuannya tiap divisi, tiap divisi punya program bantuan sendiri. Nanti dari pendaftar online hibah bansos diseleksi dulu sama Biro Kesra baru disampaikan pada tiap divisi untuk memberikan bantuannya”. (wawancara dengan Ibu Desinawati, SKM., M.Si, Staff Dinas Sosial, 17 April 2018, pukul 09.00)

Dapat peneliti pahami bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan pelaksana implementasi website E-Hibah Bansos Provinsi Banten, dimana sebagai pelaksana merupakan sebagai penanggung jawab penuh atas suatu kebijakan. Dan menurut hasil wawancara mengenai sosialisasi dari aplikasi website E-Hibah Bansos Provinsi Banten itu sendiri sudah dilakukan sosialisasi sebanyak satu kali, pada awal Juni Tahun 2014 sebelum diberlakukannya E-Hibah Bansos Provinsi Banten. Dan sampai saat ini belum diadakan sosialisasi kembali.

Sosialisasi ini juga peneliti cek kepada masyarakat untuk membuktikan apakah sosialisasi ini merata atau tidak, berikut penuturan Entus Hariyadi (I₆₋₁) sebagai masyarakat umum Kota Cilegon atau kota yang tercantum pada tabel kota yang kepala desanya mendapat sosialisasi. Berikut penuturannya sebagai berikut :

“saya pribadi tidak mengetahui adanya informasi website hibah dan bansos seperti itu, kita warga sepertinya belum diberikan informasi oleh Bapak Kades. Mba bisa coba tanya warga lain siapa tahu mengetahui informasi tersebut. Karena setahu saya kalau di komplek begini warganya sibuk kerja, termasuk saya jadi kurang informasi sepertinya.” (Entus hariyadi, BBS 2 Jl. Anggrek 3 no.3 Ciwedus Cilegon, 20 April 2018 / pukul 17.20 WIB)

Dari penuturan salah satu warga Cilegon ini dapat di dapat informasi bahwa kepala desa memiliki peranan penting untuk menyebarkan informasi kepada warganya. Kepala desa merupakan sentral informasi warga sampai ke level terendah, bisa di bilang kepala desa menjadi suksesor untuk bagian sosialisasi E-Hibah bansos ini. Dengan tidak tahunya warga mengenai adanya website E-Hibah ini menjadi salah satu bukti belum meratanya sosialisasi di tingkat desa yang menyebabkan implementasi E-Hibah ini dapat dibidang belum efektif.

Begitu pula sama halnya seperti yang dikatakan oleh Ibu Khalidah (I₆₋₂) sebagai masyarakat umum Kota Serang yaitu :

“kalau disini bantuan dari pemerintah seperti itu biasanya di koordinir oleh Bapak RT, nanti Bapak RT mendata warganya siapa saja yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan lalu Bapak RT melaporkan data tersebut kepada Kepala Desa atau Lurah. Baru dari data tersebut warga bisa mendapatkan bantuan yang di berikan pemerintah. Itu informasi yang saya ketahui dari dulu sebagai warga cipocok ini.” (Khalidah, Cipocok Jaya Kota Serang, 20 April 2018 / pukul 09.30 WIB)

Dari penuturan Ibu Khalidah dapat dilihat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada saat itu tidak tersampaikan kepada Ibu Khalidah sendiri sebagai masyarakat Kota Serang (Cipocok) yang notabennya daerah tersebut menjadi salah satu daftar desa yang diundang dalam sosialisasi mengenai E-Hibah dan bantuan Sosial Banten tersebut.

Setelah menggali informasi kepada warga kota Cilegon dan Kota Serang, peneliti juga mencari informasi kepada warga Kota Tangerang yaitu kepada Ibu Nurul Amanah (I₆₋₃) sebagai perwakilan masyarakat kota Tangerang sebagai kota yang tercantum menerima sosialisasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada saat itu. sebagai berikut :

“saya mengetahui informasi tersebut dari media, sering berita tersebut saya lihat di televisi maupun Koran yang saya baca. Setahu informasi yang saya dapatkan informasi ada pemberian dana bantuan dari pemerintah ini bisa secara online yaitu dari Bapak RT saat itu.” (Nurul Amanah, Batu Ceper Kota Tangerang, 22 April 2018 / pukul 13.30WIB)

Secara umum, penyebaran informasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh biro kesejahteraan Rakyat sebenarnya tersampaikan meskipun tidak secara merata pada semua kalangan, namun bagi sebagian masyarakat sudah mengetahui informasi penting dari E-Hibah Bansos Banten tersebut telah pemerintah sebarkan. seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurul Amanah ini bahwa informasi dapat secara mudah tersampaikan apabila bukan hanya melalui sosialisasi secara langsung tetapi juga melalui media televisi, iklan, Koran dll.

Terdapat penuturan lainnya lagi dari Risma Maulina (I₆₋₃) sebagai Masyarakat Kota Pandeglang (Gunung Putri) sebagaiberikut :

“Iya saya mengetahui informasi tersebut, saat itu mendengar dari tetangga bahwa menurut mereka saat ini mudah untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. Yaitu bisa secara online. Informasi ini warga dapatkan dari Bapak RT Rusli. Dan saya merasa informasi ini bagus untuk program pemerintah kedepannya. Dengan adanya online ini juga mempermudah kami supaya untuk mengajukan bantuan tidak repot mengajukan dokumen banyak, namun warga disini biasanya yang mengurus data warga kurang mampu yaitu Bapak RT dengan paklurah. Semoga dengan ada aplikasi ini bisa mempermudah mengakses sendiri” (Risma maulina, Gunung Putri 20 April 2018 / pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat peneliti analisis bahwa Risma mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk membuat website resmi pemerintah tersebut untuk mempermudah seluruh masyarakat agar dapat seluruh kalangan dapat menerima informasi dari pemerintah langsung secara mudah. Apalagi di era Internet seperti sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimanapun berada, keberadaan informasi ini tentu memudahkan masyarakat yang berada di lingkungan yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, atau dalam hal ini masyarakat berada jauh pusat pemerintahan yang bertitik lokasi pada KP3B.

Selain menggali informasi kepada masyarakat umum peneliti juga menggali informasi tentang sosialisasi kepada masyarakat pendaftar dari E-Hibah dan Bansos Banten tersebut. Sebagai pendaftar tentunya lebih mengetahui di banding penuturan masyarakat umum, berikut penuturan dari Saiful (I₅₋₁) :

“iya saya sudah mengetahui info website E-Hibah Bansos Banten itu, Menurut saya website ini cukup mudah diakses, dengan adanya website ini,

saya juga sebagai mahasiswa mudah untuk cara menggunakannya, informasi ini juga saya coba sebarkan kepada kawan – kawan yang bernasib sama seperti saya yang memerlukan bantuan materi untuk biaya kuliah saya ataupun mau mengajukan bantuan lainnya pun bisa. Kita tinggal membuat proposal dananya saja untuk kita ajukan” (Saiful, Kp. Andamui Tengah RT 010 Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang, 19 April 2018 / pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan penuturan diatas, dapat peneliti ketahui bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah ini dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum maupun pribadi, jika memang itu dapat membantu mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa, maka permintaan Saiful untuk diberikan bantuan untuk membayar uang kuliah juga dapat di maklumi. Terlebih cukup banyak siswa di Banten yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tetapi terkendala masalah uang kuliah. Dari sini peneliti melihat potensi yang besar jika melihat dari banyaknya uang yang ada untuk program E-Hibah untuk masyarakat ini, dengan adanya website ini tentu menjadi tembok penghancur jarak antara pemerintah dan masyarakat untuk mengajukan bantuan sosial, meskipun hanya dilakukan sosialisasi satu kali saja diharapkan para Kepala Desa dapat menyampaikan amanah yang sudah diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyampaikan informasi baik di masyarakat perkotaan maupun pelosok desa. Karena bagaimanapun adanya website ini juga menjadi kabar baik untuk mereka yang memiliki masalah sosial untuk mengajukan bantuan via Internet.

Menurut pendapat pendaftar lainnya yaitu Ibu Siti Sadiyah :

“Awalnya saya mendaftar karena didaftarkan oleh keponakan. Keluhan saya meminta bantuan dana untuk memperbaiki rumah saya yang sudah lapuk. Kini status saya sudah di survey namun belum diberi keputusan apakah mendapat bantuan atau belum.”(Siti Sadiyah, Kp. Babakan Dukuh RT 003 RW 02 Kec, Cihara Kab. Lebak, 29 April 2018 / pukul 10.00 WIB)

Ternyata tidak semua pendaftar mengetahui cara kerja website tersebut, contohnya saja Ibu Siti Sadiyah (I_{5.2}) ini merupakan salah satu pendaftar E-Hibah Bansos Banten namun tidak mendaftarkan diri sendiri namu didaftarkan oleh orang lain yang lebih tahu cara mengoperasikannya. Dengan demikian menurut Ibu Sadiyah sendiri sosialisasi mengenai informasi tersebut tidak tersampaikan kepadanya. Melihat informasi yang tidak tersampaikan padahal informasi itu penting sangat di sayangkan karena biaya yang sudah dilontarkan juga cukup besar dan apabila tidak dipakai untuk mengembangkan kinerja pemerintah yang baik maka terasa sia – sia.

Tidak berbeda jauh dengan halnya penuturan Ibu Siti, Ibu Nuryamah(I_{5.3}) pun menuturkan pendapatnya sebagai pendaftar :

“Ibu mengajukan pendaftaran bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak huni. Pendaftaran tersebut dilakukan oleh tetangga Ibu Nuryamah untuk mendaftarkan Ibu Nuryamah pada E-Hibah Bansos Banten guna agar mendapat bantuan dari pemerintah daerah tersebut.”(Nuryamah, Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kab. Lebak, 29 April 2018 / pukul 16.00 WIB)

Ibu Nuryamah merupakan salah satu pendaftar penerima Hibah dan bantuan Sosial yang peneliti teliti. Diketahui bahwa Ibu Nuryamah mengetahui informasi mengenai website bantuan tersebut atas info dari tetangganya yang terlebih dahulu mendaftarkan sebagai pendaftar penerima E-Hibah Bansos banten. Kurangnya informasi secara tidak menyeluruh ini berimpas kepada masyarakat yang benar –

benar membutuhkan bantuan menjadikan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *E-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yakni;

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *E-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*. Infrastruktur adalah hal penting dalam memenuhi sarana teknologi. Baik menyangkut perangkat keras (sarana dan prasarana) maupun perangkat lunak (program).
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *E-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Iman Sentosa (I.₁) Staff Bagian Pelaksana Biro Kesra Provinsi Banten sebagai berikut :

“Tenaga kerja tetap di Biro Kesra sendiri berjumlah 46 (empat puluh enam), sedangkan untuk tenaga kerja sukarela berjumlah 20 (dua puluh) orang, total ada 66 (enam puluh enam), dan yang mengoperasikan website hanya satu orang saja yaitu saya sendiri. Hal tersebut dikarenakan hanya saya yang bisa

mengoperasikan website tersebut. Dulu sempat memanggil teknisi lain dari luar namun hanya bertahan beberapa bulan karena pusat mencabut fasilitas tenaga luar tersebut. Untuk fasilitas komputer disini ada belasan unit aja, komputer di pakai bisa bergantian. Kalau untuk anggaran saya tidak mengetahuinya, itu urusan Bapak Irvan selaku kepala Biro Kesra. Dan kalau masalah website kurang update memang kami akui di karenakan yang mengoperasikan website hanya saya. Dan sayapun kerjanya merangkap, jadi bukan hanya mengelola website saja tetapi juga mengerjakan hal lain karena saya sebagai staff pelaksana Biro Kesra yang sering menjadi wakil dari Biro untuk mengurus segala halnya.” (wawancara dengan Bapak Iman Sentosa, Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 17 April 2018, pukul 10.30)

Tabel 4.4

Jumlah Tenaga Kerja di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

No	Jenis Tenaga Kerja	Jumlah
1	Tenaga Kerja Tetap	46
2	Tenaga Kerja Sukarela	20
Jumlah Tenaga Kerja		66

Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2018

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa staff yang bekerja di Biro Kesejahteraan Rakyat sudah cukup memadai dalam perihal jumlah, namun minim dalam hal tenaga kerja yang handal di bidang pengoperasian website E-Hibah Bansos banten. Hal tersebut yang membuat website pemerintah tersebut kurang terurus. Hal tersebut di sebabkan hanya ada satu orang yang mengelola website E-Hibah dan Bansos, yang mengakibatkan kurang updatenya informasi pada website. Seharusnya Biro Kesejahteraan Rakyat dapat dengan serius menggarap website E-Hibah Bansos Banten ini secara maksimal, karena di era serba *Online* seperti sekarang ini internet terbukti mampu menjangkau masyarakat dengan lebih jauh. Bukti keseriusan itu tentu saja dengan menunjuk orang yang memiliki kemampuan untuk

mengoperasikan website agar dapat melakukan *follow up* pertanyaan maupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Minimnya staff khusus yang ditunjuk untuk mengoperasikan website tentu menjadi masalah untuk kesuksesan implementasi website E-Hibah dan Bansos ini. Jika website jarang di cek dan di *update*, maka dikhawatirkan adanya ketidakpercayaan masyarakat mengenai perkembangan atas pengajuan bantuan yang sudah mereka ajukan, karena masyarakat butuh kepastian secara cepat dan tepat. Tidak lambat dalam mengupdate siapa saja yang diterima ajuan bantuannya pada website. Serta harus lebih cepat dalam merespon email ajuan bagi pendaftar baru.

Permasalahan di *Capacity* yakni kurangnya SDM yang handal dalam mengoperasikan website. Hal tersebut akan berimbas pada kurangnya update informasi pada website, tentu hal ini menyebabkan website E-Hibah Bansos Banten kurang dapat di manfaatkan oleh penggunanya, padahal update informasi ini menjadi hal penting untuk masyarakat agar dapat melihat perkembangan terbaru mengenai program bantuan pemerintah tersebut, agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparansi.

Adapun penjelasan lain perihal sumber daya financial, yang tidak kalah penting dengan sumber daya manusia yang handal untuk kesuksesan program tersebut. Berikut pendapat Bapak Endang Heryanto (I.3) sebagai Staff DPPKD Provinsi Banten sebagai berikut:

“Dana hibah dan bansos mencapai Rp 487 miliar rencananya akan dibagikan dalam beberapa kelompok. Seperti dana hibah akan diberikan kepada 174 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Banten dengan nilai yang mencapai Rp 358,9 miliar. Sedangkan penerima dana bansos terdiri dari sebanyak 52.900 individu/keluarga, 48 kelompok masyarakat dan 8 lembaga yang ada di Provinsi Banten dengan total nilai mencapai Rp 128,9 miliar. Dana itu akan diberikan sesuai data yang kami terima,” (wawancara dengan Bapak Endad Heryanto, Staff DPPKD Provinsi Banten, 18 April 2018, pukul 10.00)

Bapak Endad Heryanto menyatakan dana yang dikeluarkan Tahun 2018 ini terbilang banyak, yaitu Rp 487 miliar untuk Hibah dan bantuan Sosialnya. Dana ini nantinya akan di bagi untuk masyarakat umum maupun instansi. Untuk masyarakat nantinya akan di berikan kepada mereka yang membutuhkan bantuan sosial seperti renovasi rumah, masjid, jalan atau siapapun yang sekiranya membutuhnya bantuan sosial dapat mengajukan bantuan via internet melalui E-Hibah dan Bansos ini. Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Banten juga mendapat jatah dana Hibah, total ada 174 (seratus tujuh puluh empat) badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Banten, hal ini dirasa wajar karena banyak lembaga kemasyarakatan yang memiliki program untuk masyarakat tetapi tidak memiliki dana untuk merealisasikannya, maka dana Hibah ini dapat menjadi jawaban agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat Banten.

Melihat permasalahan tersebut peneliti akan mencari tahu dari sudut pandang dari masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Banten tersebut, berikut penuturan dari Saiful (I₅₋₁) :

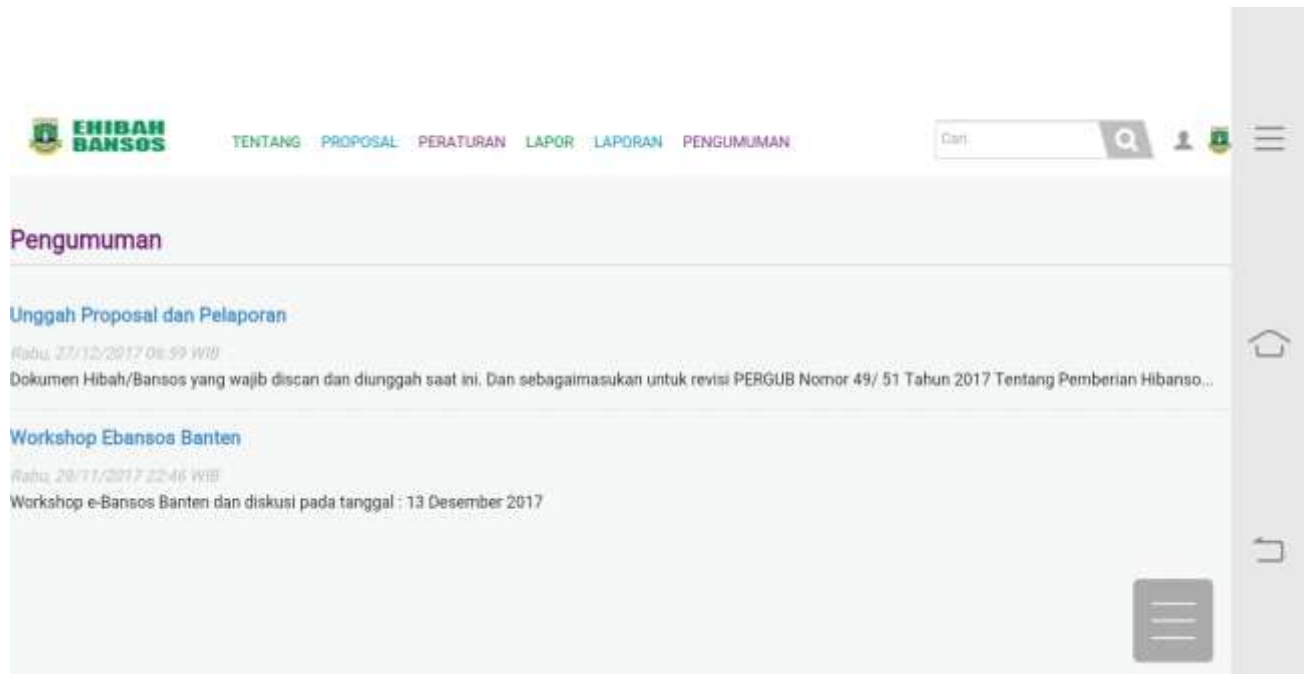
“Saya kadang mengecek berita terbaru dari website yaitu waktunya antara 2 – 3 hari saya pasti liat perkembangan website, untuk melihat informasi tentang bantuan dana yang saya ajukan. Menurut saya memang website ini kurang mengupdate informasi, karena kadang sampai 2 minggu pun tidak ada informasi terbaru, yang menimbulkan kesan kurang baik bagi pemerintah dalam memelihara website tersebut.” (Saiful, Kp. Andamui Tengah RT 010 Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang, 19 April 2018 / pukul 09.00 WIB)

Menurut Saiful E-Hibah Bansos Banten ini tidak punya waktu update yang pasti untuk memperbaharui informasi pada website, sehingga masyarakat harus rajin – rajin mengecek website untuk melihat informasi terbaru. Tidak adanya informasi yang di update bukan berarti tidak ada informasi apapun, tetapi karena tidak adanya staff yang mengupdate informasi secara langsung ataupun menunggu untuk mengumpulkan informasi secara kolektif baru website akan di update. Hal yang terpenting dari website ini ialah mengenai kecepatan pemerintah dalam merespon segala ajuan dan pertanyaan masyarakat, dan itu tidak bisa terlaksana karena tidak adanya staff yang rajin mengecek website, atau lebih parahnya lagi staff tidak mengetahui cara mengoperasikan website E-Hibah Bansos Banten ini. Hal ini mengakibatkan banyaknya masukan pengajuan hibah dan bantuan sosial yang tertumpuk begitu saja karena lambannya update mengenai hasil penyeleksian para pendaftar penerima hibah dan bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah.

Peneliti mengecek secara langsung dan memang dari website E-Hibah Bansos ini tidak ada pengumuman yang di update. Hanya ada 2 pengumuman yang tertera, yaitu mengenai Workshop EBansos Banten dan unggah proposal dan pelaporan, dan keduanya berasal dari tahun 2017

Ganbar 4.4

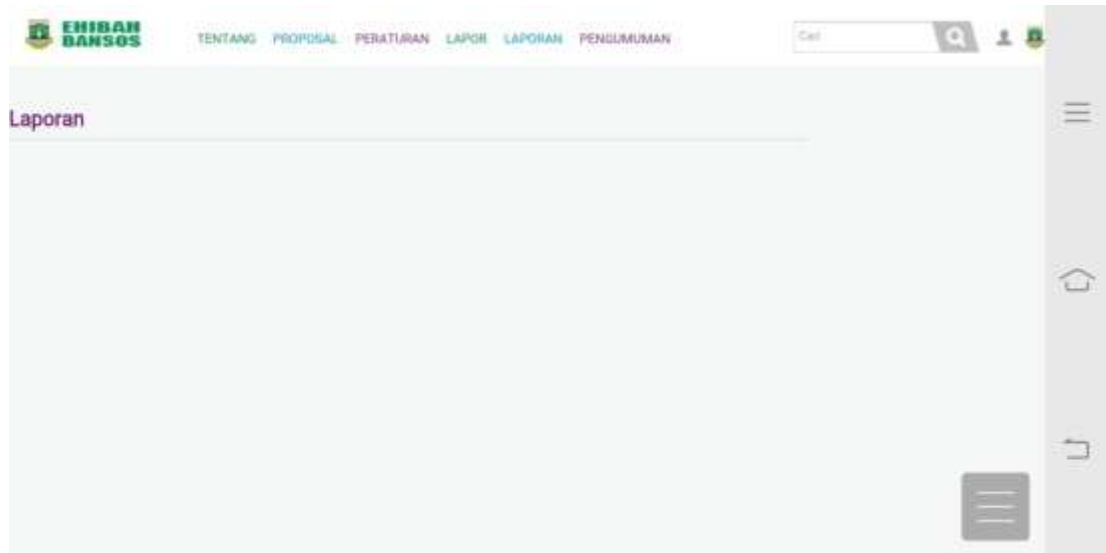
Pengumuman dalam website E- Hibah Banten



Bukti screen shot yang peneliti dapatkan di website E-hibah Bantoss ini menjadi bukti tidak adanya informasi terbaru yang di update untuk masyarakat maupun para pengaju bantuan dana hibah.

Gambar 4.5

Laporan dalam website E-Hibah Bansos



Selain pengumuman yang hanya ada 2 saja, laporan yang tertera dalam website E-Hibah Bansos pun kosong tidak ada satupun, padahal website ini sudah berumur lebih dari satu tahun, tidak adanya laporan mengenai kegiatan, acara ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Biro Kesra Pemprov Banten ini juga yang menjadi pertanyaan dari masyarakat termasuk peneliti sendiri. Dalam website E-Hibah bansos ini juga tidak ada pilihan bahasa selain bahasa Indonesia, padahal pada umumnya website menyediakan bahasa lain melihat luasnya jangkauan internet, seharusnya website E-Hibah Bansos ini menyediakan bahasa lain selain bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.

Tidak adanya update pada website ini juga menjadi keluhan bagi pendaftar lainnya yaitu bagi Ibu Siti Sadiyah(I₅₋₂):

“Ibu kurang mendapat informasi dari websitenya, karena menurut penuturan anak ibu tidak ada perkembangan dengan bantuan dana yang ibu ajukan. Sedangkan informasi tersebut sangat penting dan selalu kami tunggu. (wawancara dengan Ibu Siti Sadiyah, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 29 April 2018, pukul 10.00)

Menurut Ibu Sadiyah, informasi di website perlu di update secara berkala, agar para pendaftar yang mengajukan dana Hibah dan Bantuan Sosial mendapatkan kepastian informasi secara cepat dan tepat. Sebagai pendaftar Ibu Siti Sadiyah sangat berharap pemerintah akan cepat menindaklanjuti secara cepat program bantuan tersebut, karena melihat kebutuhannya yang agak mendesak. Yaitu bantuan dana yang diajukan untuk perbaikan rumah yang sudah tidak layak huni yang menjadikan Ibu Siti berharap besar kepada program pemerintah tersebut.

Bukan hanya Saiful dan Ibu Siti Sadiyah saja yang peneliti kulik informasinya namu juga kepada pendaftar lain yang memiliki pendapat yang hamper sama. Begini menurut pendapat Ibu Encih(I₅₋₃) :

“yang saya ketahui mereka jarang memberikan informasi baru di websitenya karena tidak ada aktifitas pada website.” (wawancara dengan Ibu Encih, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 19 April 2018, pukul 16.20)

Tidak adanya informasi baru di website lagi – lagi memberikan dampak negatif karena masyarakat merasa diabaikan dan merasa pemerintah tidak bersungguh – sungguh akan penerapan website pemerintah tersebut.

Pendapat lainpun terlontar dari Ibu Nuryamah perihal pendapatnya mengenai website E-Hibah Bansos Banten tersebut :

“saya tidak mengikuti perkembangan website tersebut, saya hanya sesekali mengulik informasi dari saudara untuk mengecek apakah ada pengumuman mengenai penerimaan ajuan Ibu atau tidak.”(wawancara dengan Ibu Nuryamah, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 29 April 2018, pukul 16.00)

Dilihat dari pernyataan Ibu Nuryamah ini sangat jelas Ibu tidak mengikuti informasi pada website E-Hibah Bansos Banten. Hal tersebut disebabkan oleh tidak handalnya Ibu dalam menggunakan *gadget* sebagai alat mengulik informasi seputar ajuan bantuan dana yang ibu minta kepada pemerintah. Situasi ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat memiliki akses informasi karena terhambat kurangnya kelancaran menggunakan gadget, ataupun tidak adanya sinyal pada suatu daerah, serta bisa jadi karena tidak adanya listrik sebagai alat pendukung dari tercapainya suatu informasi efektif dan efisien.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *E-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasadiuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *E-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam

memilih prioritas jenis aplikasi *E-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya.

Seperti apa yang dilontarkan oleh Saiful (I.5-1) Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten sebagai berikut:

“Menurut saya dengan adanya penerapan website E-Hibah Bansos banten ini dapat mempermudah saya untuk mengajukan dana kuliah kepada pemerintah.” (wawancara dengan Saiful, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 19 April 2018, pukul 09.00)

Keberadaan Website ini menurut Saiful memiliki manfaat untuk masyarakat khususnya kepadanya, berkat kemudahan informasi tersebut Saiful dapat mengajukan kebutuhan bantuan dana secara mudah kepada pemerintah tanpa harus datang langsung kepada pemerintah, tetapi hanya dengan menggunakan komputer saja Saiful bisa dengan cepat melakukan pengajuan secara online di waktu kapan saja dan bertempat dimana saja. Namun dengan itu Saiful sangat berharap sehingga keberadaan website perlu dimaksimalkan agar tercapai tujuan awal dari website ini dibuat. Manfaat ini akan terasa bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan apapun termasuk Saiful yang membutuhkan dana kuliah, maupun bantuan lainnya seperti perbaikan rumah, pembenaran jalan, pemberian aliran listrik di desa – desa atau urusan lainnya yang menyangkut masalah sosial.

Kasus saiful yang mengajukan dana untuk membayar uang kuliah menjadi contoh banyaknya masyarakat Banten yang memiliki masalah keuangan dan

mengharapkan bantuan pemerintah, peneliti yakin banyak kasus serupa yang dialami oleh Saiful dan memiliki keterbatasan informasi untuk mengajukan dana kuliah. Pendidikan tentu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka semangat mencerdaskan bangsa, maka dengan memberikan bantuan dana berupa uang kuliah diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melanjutkan pendidikan, atau minimal menghilangkan opsi di masyarakat kelas menengah kebawah untuk memilih antara membayar uang kuliah anak atau makan sehari-hari. Adanya website ini juga dapat menjadi data pemerintah mengenai banyaknya warga Banten yang ingin kuliah tetapi terkendala uang kuliah yang terus naik.

Dari keterangan Saiful juga didapat informasi bahwa masyarakat mengetahui bahwa nantinya para pengaju bantuan dana Hibah dan Bantuan sosial ini akan di survey oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melihat langsung data lapangan. Bagi mereka yang memenuhi syarat maka akan diberikan dana sesuai dengan kebutuhan, survey ini menjadi hal yang penting untuk mengecek langsung keadaan masyarakat, kehadiran pemerintah di tengah kondisi masyarakat menjadi *value* lebih dan akan lebih terasa dampak positif psikologis kepada masyarakatnya. Maka adanya website E-Hibah Bansos Banten ini tentunya menjadi salah satu cara agar pemerintah menghilangkan opini masyarakat kepada kesan pemerintah tidak yang peduli dan tidak menyediakan ruang dan tempat untuk masyarakat, jadi bisa terkikis bahkan dapat merubah pandangan seluruh kalangan masyarakat. Peneliti melihat banyak

dampak positif jika website E-Hibah dan Bantuan Sosial ini dapat di laksanakan dengan baik dan secara maksimal.

Keterangan lainnya dari Ibu Siti Sadiyah (I.5.2) Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten sebagai berikut:

“Bantuan pemerintah ini bermanfaat bagi masyarakatnya, namun kalau dilihat dari sisi pengelolaan website yang Ibu Siti Sadiyah sendiri tidak mengetahui menjadi penghambat untuk memberikan informasi secara lebih dalam lagi mengenai website tersebut.” (wawancara dengan Ibu Siti Sadiyah, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 29 April 2018, pukul 10.00)

Masyarakat Banten tentunya mendapat angin segar ketika mendapat informasi bahwa masyarakat kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Banten, artinya mereka bisa berkesempatan untuk mendapatkan renovasi agar dapat tinggal dirumah yang layak huni. Program E-Hibah dan Bantuan Sosial Banten inijuga dapat merenovasi rumah tidak layak huni serta masjid – masjid yang membutuhkan renovasi dan perawatan di kalangan masyarakat Banten yang berada di pelosok desa serta jauh dari perhatian pemerintah Provinsi Mereka yang mengalami nasib seperti ibu Sadiyah juga sudah bertahun – tahun hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki biaya untuk melakukan renovasi rumah, adanya kesempatan untuk mendapatkan program renovasi rumah menjadi harapan besar untuk masyarakat kurang mampu, kebanyakan dari mereka juga sudah berada di usia senja, bisa dibayangkan betapa sulit untuk merasa nyaman dan aman dalam keadaan rumah yang tidak layak huni dan berada di usia senja, maka program renovasi rumah yang bisa didaftarkan melalui website E-Hibah dan Bantuan sosial

Banten ini menjadi salah satu hal yang begitu bagus untuk membalikkan keadaan masyarakat, minimal dengan menempatkan mereka dalam rumah yang layak huni untuk kenyamanan para orang tua yang kurang mampu di provinsi Banten ini. Program ini juga seharusnya dapat menjadi aspek sosial yang bagus, karena masyarakat dapat mendaftarkan keluarganya ataupun tetangganya yang memiliki masalah sosial untuk mendapatkan renovasi rumah. Para takmir masjid – masjid yang berada di pedesaan pun dapat mengajukan dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk merenovasi Masjid di daerahnya. Sehingga masjid – masjid di pedesaan bisa mendapatkan dana untuk merenovasi maupun melakukan perawatan untuk kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

Ada lagi pendapat lainnya mengenai manfaat dari website E-Hibah Bansos Banten ini dilontarkan oleh Ibu Nuryamah (I.5.3) Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten sebagai berikut:

“saya merasa dibantu dengan adanya website pemerintah ini menjadi memudahkan warga desa bisa mendapat bantuan, meskipun saya juga dibantu didaftarkan oleh tetangga sekitar tetapi pendapat saya lumayan dimudahkan. Semoga kedepannya dapat ditingkatkan lagi karena disini susah sinyal yang menjadi penghambat para warga kesulitan mengakses internet secara cepat.”
(wawancara dengan Ibu Nuryamah, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 29 April 2018, pukul 16.00)

Peneliti melihat bahwa pemerintah sudah melakukan upaya yang bagus untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengajukan bantuan dana Hibah dan Bantuan Sosial ini melalui Website E-Hibah dan bantuan Sosial Banten ini, tetapi memang fakta lapangan juga banyak ditemukan masyarakat Banten yang belum tersentuh

internet, maka perlu adanya bantuan dari kepala desa setempat atau masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet agar dapat mendaftarkan warga yang kurang mampu, semangat saling membantu di lini horizontal sesama warga menjadi hal yang bagus terlebih ketika mereka tidak memiliki kemampuan menggunakan internet.

Dapat dikatakan ada banyak warga yang mengalami hal seperti Ibu Nuryamah, berada dalam kondisi rumah tidak layak huni, memiliki keinginan untuk mendapatkan program renovasi rumah, tetapi tidak memiliki akses internet. Di Banten sendiri masih banyak warga yang bahkan belum dapat menikmati listrik hingga saat ini, masalah seperti ini yang sebenarnya ingin dipecah oleh pemerintah dengan menyediakan website E-Hibah dan Bantuan Sosial Banten, pemerintah juga mengharapkan adanya kerjasama dengan kepala desa maupun warga sekitar untuk mendaftarkan mereka agar dapat terdata dan akan ditindak lanjuti. Pendataan secara sentral ke website E-Hibah dan Bantuan Sosial Banten ini juga memudahkan Biro Kesejahteraan Rakyat untuk melihat potensi krusial yang harus secara cepat mendapatkan perhatian. Ada cukup banyak klasifikasi untuk pengajuan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial ini, dan adanya website membantu pemerintah untuk melihat permasalahan apa yang banyak dialami oleh warga Banten. Sebagai Provinsi baru di Indonesia tentunya Banten harus mengejar banyak ketertinggalan agar setara dengan provinsi lainnya, dan permasalahan sosial merupakan hal yang perlu

mendapat perhatian lebih, terlebih ada banyak masyarakat Banten yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan.

Adapun penuturan lainnya dari Encih (I.5.4), Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten sebagai berikut:

”keterbatasan tidak memiliki handphone menjadi penghambat saya, akhirnya menjadi gaktek dalam menggunakan teknologi, sehingganya mendapat informasi website selama ini hanya dari kepala desa setempat.”(wawancara dengan Ibu Encih, Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 19 April 2018, pukul 16.20)

Kepala desa menjadi tolak ukur untuk melihat apakah ada perubahan dalam masalah sosial para warganya dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, jangan sampai ada kesenjangan informasi dimana satu desa banyak yang mendaftarkan diri untuk mengajukan dana Hibah dan Bantuan Sosial tetapi di sisi lain ada desa yang sama sekali tidak mendaftarkan warganya, karena peneliti yakin di setiap desa memiliki masalah sosial dan sama – sama membutuhkan bantuan. Pada situasi ini Encih masih terlibat beruntung Kepala Desa yang sangat peduli akan warganya sehingga Encih didaftarkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Begitu pula penuturan yang hampir sama dari ibu Rukmi (I.5.5) Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten sebagai berikut:

“ibu sama warga sini masalah bantuan dari pemerintah biasanya ke Bapak RT Pak Rusli, yang suka ngedata warga disini yang kurang mampu. Suka dapat bantuan perbaikan jalan, sembako. Katanya sekarang minta bedah rumah ya supaya layak ditempatin. Termasuk rumah saya ini rumah lama dari jaman penjajahan belum pernah dibangun lagi.”(wawancara dengan Ibu Rukmi,

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten, 29 April 2018, pukul 17.00)

Dari beberapa masyarakat pendaftar E-Hibah dan Bansos Banten tersebut terlihat bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi secara mendasar, atau biasa disebut *digital divide* atau kesenjangan digital. Hal ini yang menyebabkan masih sedikit pendaftar dari website Pemerintah Daerah ini karena masyarakat masih banyak yang tidak mengerti internet. Disini perlunya pemerintah memberikan sosialisasi secara merata kalau perlu diberikan pengajaran teknologi kepada masyarakat desa yang gaptেক menjadi mengetahui teknologi.

Gambar 4.6

Program Kegiatan Listrik Masuk Desa (LISDES) Provinsi Banten

The screenshot displays the E-Hibah Bansos website interface. At the top, there is a navigation menu with links for 'TENTANG', 'PROPOSAL', 'PERATURAN', 'LAPOR', 'LAPORAN', and 'PENGUMUMAN'. A search bar is located on the right side of the header. Below the header, there is a search bar for 'Cari Proposal' and a 'Semua' button. The main content area is divided into two columns. The left column lists various categories of grants, including 'Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah', 'Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan', 'Dinas Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana', 'Badan Keasetan Bangsa dan Politik', 'Dinas Perikanan, Mada dan Pelayaran Terpadu Sekeloa Atas', 'Dinas Pendidikan dan Kebudayaan', 'Dinas Kesehatan', 'Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang', 'Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman', 'Dinas Perhubungan', and 'Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral'. The right column displays two grant listings. The first listing is for 'Kegiatan LISDES Provinsi Banten' with a 'Tanggal Masuk Proposal' of May 30, 2018, 'Tahun Anggaran' of 2019, 'Oleh' LISDES, 'Tahapan' of 'Klasifikasi sesuai OPD', and 'Kategori' of 'Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral'. It also mentions 'Memberikan bantuan kepada 14500 warga Banten' and 'Nilai yang Diajukan: Rp. 22.475.000.000,-' with 'Nilai yang Disetujui: -'. The second listing is for 'Bantuan Program Ternak Kambing dan Itik Petelor' with a 'Tanggal Masuk Proposal' of May 18, 2018, 'Tahun Anggaran' of 2018, 'Oleh' dinas, 'Tahapan' of 'Klasifikasi sesuai OPD', and 'Kategori' of 'Dinas Pertanian'. It describes a program for 'Krisis ekonomi yang berkepanjangan, berdampak pada ketidakmampuan peternak ternak dalam pengadaan modal untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi peternak...' and 'Nilai yang Diajukan: Rp. 701.000.000,-' with 'Nilai yang Disetujui: -'. A sidebar on the right contains navigation icons for home and back.

Dalam update terbaru website E-Hibah Bansos ini peneliti melihat adanya kegiatan listrik masuk desa (LISDES) untuk 14.500 rumah tangga sasaran (RTS) di Provinsi Banten. Banyaknya masyarakat Banten yang belum menikmati listrik ini menjadi salah satu kendala pemerintah untuk memberikan bantuan sosial melalui website yang menggunakan internet. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mempermudah kegiatan masyarakat terutama di malam hari. Dari website juga peneliti mengetahui bahwa kegiatan LISDES ini akan dilaksanakan di tahun anggaran 2019 dan menelan biaya Rp.22.475.000.000

Data dari website E-Hibah dan Bantuan Sosial peneliti menemukan dari Tahun 2015-2016 jumlah pengajuan bantuan hanya ada 40 orang saja. Itu artinya selama kurang waktu 2 tahun hanya 20 pengaju bantuan dana pertahun ke website ini, padahal banyaknya dana yang disediakan oleh pemerintah seharusnya dapat di manfaatkan sebaik dan secepatnya oleh masyarakat. Pertanyaan mengenai mengapa hal ini dapat terjadi tentunya menjadi pertanyaan peneliti dimana letak permasalahannya sehingga Implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial ini kurang dapat berjalan efektif. Peneliti mengatakan website E-Hibah dan Bantuan Sosial ini kurang efektif melihat dari kurangnya partisipasi masyarakat yang bisa jadi mereka tidak mendapatkan informasi ini. Adanya website E-Hibah dan Bantuan Sosial Banten ini menjadi hal yang bagus karena masyarakat dapat mengambil manfaat yaitu tidak perlu lagi untuk mendatangi dinas terkait untuk mengajukan bantuan dana, *value* ini yang seharusnya dapat terus disalurkan oleh pemerintah untuk memudahkan

masyarakat dengan menyediakan fasilitas website yang memang mampu menjangkau masyarakat terjauh sekalipun, sehingga tidak ada kecemburuan antara masyarakat yang dekat dengan pemerintah provinsi dengan mereka yang jauh di pelosok desa, nilai lebih lainnya adalah masyarakat akan memiliki status yang sama untuk menjadi pengaju bantuan dana ini, karena nantinya semua proposal yang masuk di website E-Hibah dan Bantuan Sosial Banten ini akan mendapat giliran untuk dikunjungi, dilakukan survey dan diberikan keputusan untuk mendapatkan bantuan atau tidak, bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dibantu, tentu mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai upaya untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Saat ini masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan luas diseluruh wilayah negara dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Selain itu ada kebutuhan pemerintah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang dimiliki, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan publik bertolak pada asas-asas transparansi, akuntabilitas serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* serta diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan

keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* secara nasional. Ciri *E-Government* sudah terimplemtasi dengan baik terlihat dari informasi di website yang *up to date*, website juga harus tersedia dengan banyak bahasa selain bahasa Indonesia, misalnya dengan menyertakan *english version*. Hal lain harus tersedianya komunikasi dua arah dari pemerintah kepada masyarakat dan pihak terkait baik melalui E-mail, nomor telephone, serta adanya respon yang cepat dari pemerintah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kritik yang masuk dari masyarakat. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa strategi pengembangan E-goverment? Dalam lampiran Inpres *E-goverment*, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:

1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.
5. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
6. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Dalam pengembangan e-government, dapat

dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Adapun undang – undang yang terbaru yaitu Peraturan menteri komunikasi dan informatika replubik Indonesia Tahun 2017 tentang penyelenggaraan portal dan situs web badan pemerintahan sebagai dasar kebijakan mengenai pentingnya penerapan website online pemerintah tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing kajian dari teori yang digunakan, maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa implementasi E-Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten belum berjalan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Berikut beberapa aspek yang dinilai belum optimal dan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Kurangnya sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan aplikasi E-Hibah Bansos Provinsi Banten, seharusnya di dukung dengan sosialisasi menggunakan media massa mainstream di Banten. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang handal sebagai teknisi E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten, kurangnya SDM berpengaruh terhadap informasi yang kurang *up to date* pada website E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten serta Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi secara mendasar, atau biasa disebut *digital divide* atau kesenjangan digital.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar implementasi *E-Government* Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten berjalan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Memberikan dan melakukan pengenalan secara mendalam ke daerah – daerah yang ada di seluruh Provinsi Banten berupa sosialisasi dalam bentuk penyampaian materi, pelatihan komputerisasi, maupun membuat iklan layanan masyarakat melalui media tradisional maupun non tradisional agar penyampaian pesan lebih efektif dan efisien.
2. Pemerintah harus memberikan pelatihan atau bimbingan teknis (BIMTEK) bidang komputerisasi terutama yang dibutuhkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat guna meningkatkan kinerja pemerintah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Adanya bimbingan teknis ini akan membuat masyarakat mamahami setiap detail yang ada dalam website E-Hibah Bansos dan dapat menggunakannya dengan benar.
3. Pemerintah harus dapat meningkatkan infrastruktur pengelolaan informasi website tersebut, dengan cara selalu merespon atau membalas email yang masuk, dan mengupdate informasi secara cepat.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tidak cukup hanya diberikan sosialisasi atau pelatihan komputerisasi saja tetapi diperlukan sebuah infrastruktur atau fasilitas pendukung lainnya, seperti adanya internet, komputer, *gadget*, dan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Afriani, K. dan Fathul W. 2007. *"Dampak E-Government pada Good n Governance: Temuan Empiris dari Kota Jambi"*. SNATI; Jambi
- Agustine Eva, 2005. *Konsep E-Government; tantangan peningkatan pelayanan pada masyarakat*.SNATI; Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Andrianto, Nico.2007.*Good e-Government Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*.Malang: Bayu Media.
- Aziz, Herry Abdul, 2008. *Intergrasi E-Government: Tantangan, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta
- Bappenas. 2008. *Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Membantu Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Djunaedi, Ahmad. 2002. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Di Beberapa Daerah Di Indonesia*. FMIPA – UGM. Yogyakarta
- Dwiyanto, A. 2008. *"Mengapa Pelayanan Publik?"* dalam Agus Dwiyanto (ed). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: GMU Press. Hal: 17-42
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho.2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- IndrajitRichardus Eko, *Electronic Government*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Indrajit, RichardusEko. 2006.*Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi*.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Jjjjj Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Eko.2008. *Sistem Informasi Manajemen Konsep, Aplikasi dan Perkembangannya*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Richard Heeks, *The Implementation of Information Systems in Public Organisations*, 2005

- Rudianto, Dudy dan Akbar Zainuddin. 2007. *Electronic Government In Action*. Jakarta: Aptikom
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Alikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Karyailmiah :

- Sri Purwandani Maesaroh Rihandoyo. 2015. *Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Pati yang di buat pada tahun*. Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Nurul Wahida Safitri. 2016. *Penerapan E-Government Di Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Kabupaten Pinrang*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Peraturan:

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)

Website :

www.ehibahbansos.bantenprov.go.id

Pedoman Wawancara

Key Informan

Staff Bagian Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Bagaimana sejarah awal penerapan kebijakan E-Hibah Bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat ?
2. Berapakah jumlah tenaga kerja di Biro Kesejahteraan Rakyat ?
3. Berapakah jumlah tenaga ahli komputerisasi di Biro kesejahteraan Rakyat?
4. Apakah ada penambahan tenaga ahli untuk mendukung kinerja untuk kebijakan E-Hibah Bansos ?
5. Apa manfaat diterapkannya E-Hibah Bansos ?
6. Apakah setelah diterapkannya E-Hibah Bansos, sudah tidak menggunakan cara manual untuk mendaftar dan sebagainya ?
7. Adakah kendala dalam menerapkan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?
8. Sudahkan melakukan sosialisasi untuk kebijakan E-Hibah Bansos Banten ini ?
9. Bagaimana cara mendaftar E-Hibah Bansos Banten ?
10. Adakah kriteria atau syarat sebagai pendaftar E-Hibah Bansos Banten ?
11. Bersumber dari manakah anggaran untuk hibah dan bansos di banten ?

Pedoman Wawancara

Secondary Informan

Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)

1. Siapakah yang memberi dan menerima wewenang untuk menjalankan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?
2. Apakah bagian KOMINFO ikut membantu melaksanakan E-Hibah Bansos Banten ?
3. Sejak kapan E-Hibah Bansos Banten direalisasikan ?

Staff bidang Aset DPPKADProvinsi Banten

1. Siapakah yang melaksanakan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?
2. Darimana anggaran untuk E-Hibah Bansos Banten ?
3. Berapakah anggaran E-Hibah Bansos Banten ?

Staff Dinas Sosial

1. Apakah Dinas Sosial yang melaksanakan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?saya ingin mengulik lebih dalam mengenai Website pemerinta Daerah tersebut.
2. Apakah Dinas Sosial bekerjasama dengan Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menjalankan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?
3. Bagaimana cara kerja pembagian Hibah dan Bansos kepada masyarakat ?

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

1. Apakah Bapak/Ibu pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?
2. Apa alasan Bapak/Ibu mendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?
4. Adakah kesulitan dalam mendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu E-Hibah Bansos Provinsi Banten bermanfaat ?

Masyarakat umum (bukan pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kebijakan E-Hibah Bansos Provinsi Banten ?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan tersebut bermanfaat ?
3. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau kembangkan untuk kebijakan E-Hibah Bansos Provinsi Banten tersebut ?

Hasil Wawancara

Staff Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Nama : Iman Sentosa, S.H

Jabatan : Staff Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten

Lokasi : KP3B

Tanggal/Waktu : 17 April 2018, Pukul 10.30 WIB

Peneliti : “Selamat pagi pak, saya ingin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara untuk penelitian saya mengenai Implementasi *E-Government* Hibah dan bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten ini apakah bisa?”

Iman Sentosa, S.H: “Silahkan neng, mau tanya apa Inshaa Allah akan Bapak jawab.”

Peneliti : “Bapak Iman bertugas sebagai apa di Biro Kesra pak?”

Iman Sentosa, S.H: “saya disini sebagai staff Biro Kesra bagian Pelaksanaan neng, tugas saya banyak termasuk ngurus web Bansos dan lainnya. Saya juga sering perwakilan keluar untuk menghadiri acara.”

Peneliti : “Bagaimana sejarah awal penerapan kebijakan E-Hibah Bansos di Biro Kesejahteraan Rakyat itu sendiri Pak?”

Iman Sentosa, S.H: “Mulanya kewenangan tersebut datangya dari pemerintah pusat neng, lalu diberikanlah wewenang itu untuk diterapkan pada Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah daerah Provinsi banten. Yang mendapatkan wewenang tersebut sebenarnya bagian KOMINFO, Cuma KOMINFO memberikan wewenangnya kepada kami Biro Kesra sebagai pelaksana kebijakannya, begitu.”

Peneliti : “Berapakah jumlah tenaga kerja di Biro Kesejahteraan Rakyat itu sendiri pak?”

Iman Sentosa, S.H : “Ada 46 anggota tetap disini neng.”

Peneliti : “Kalau untuk tenaga ahlinya sendiri dibidang menjalankan E-Hibah Bansos banten itu sendiri berapa banyak?”

Iman Sentosa, S.H: “Cuma saya, ada 1 saja, sebenarnya kami pengen menambah tenaga lagi Cuma belum di Acc sama pusat, padahal sudah meminta untuk diberi tenaga ahli komputerisasi, ya pokoknya dibidangnya lah supaya web juga selalu aktif jika saya ada tugas diluar.”

Peneliti : “oh begitu Pak, kalau begitu apa ada penambahan tenaga ahli supaya mendukung kinerja E-Hibah Bansos Banten ini?”

Iman Sentosa, S.H: “Sebenarnya ingin sekali ditambah, dari pihak sini sendiri sudah mengajukan surat ijin penambahan tenaga kerja ahli komputer kok neng ke pusat, tapi belum ada penambahan sampai sekarang.”

Peneliti : “Oh ya, untuk E-Hibah Bansos Banten itu sendiri apa si manfaatnya Pak Iman?”

Iman Sentosa, S.H: “Tujuan dan manfaatnya ya untuk mempermudah segala sesuatunya neng, dari mendaftar, mencari info-info tentang hibah dan Bansos, memberikan saran dan masukan untuk kami supaya kinerja lebih baik lagi. Yang utama si untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan, tanpa repot mengurusnya, apalagi yang kotanya jauh dari KP3B ini kan.”

Peneliti : “Apakah setelah diterapkannya E-Hibah Bansos, sudah tidak menggunakan cara manual untuk mendaftar dan sebagainya Pak?”

Iman Sentosa, S.H: “Masih terima langsung daftar kesini ko neng, kan kalau yang jaraknya dekat ya bisa saja, bukan masyarakat saja kan yang terima kadang dari kepala desanya saja yang mendata, sekolah-sekolah yang butuh bantuan, lembaga masyarakat dll.”

Peneliti : “Adakah kendala dalam menerapkan kebijakan E-Hibah Bansos Banten ?

Iman Sentosa, S.H: “Ya paling itu tadi neng kendalanya masalah yang ngoperasiin webnya itu, makanya tampilan web sederhana, tidak update setiap hari, kualahan ngurusin sana sini sayanya. Tapi sebisa mungkin untuk buka kalau sedang tidak sibuk.”

Peneliti : “Sudahkan melakukan sosialisasi untuk kebijakan E-Hibah Bansos Banten ini ?

Iman Sentosa, S.H: “sudah ada ko neng, 1 kali itu pas sebelum beroperasi webnya, pada Juni 2014 tepatnya, mengundang kurang lebih 100 kepala desa untuk kita beri informasi penggunaan website ini.”

Peneliti : “Bagaimana cara mendaftar E-Hibah Bansos banten ini pak?”

Iman Sentosa, S.H: “caranya mudah tinggal buat akun pribadi menggunakan email sendiri, nanti masuk web kami, lalu isi formulir pendaftaran yang tertera pada website, lalu sertakan foto proposal atau sesuatu yang ingin diajukan sebagai bukti nyata pengajuan dana atau jasanya.”

Peneliti : “Adakah ada kriteria atau syarat sebagai pendaftar E-Hibah Bansos Banten ?

Iman Sentosa, S.H: “Individu, keluarga atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk Lembaga non pemerintahan juga bisa bidang

pendidikan, keagamaan, dan bidang lain, begitupun kepada lembaga sosial masyarakat dan masyarakat kreatif lainnya.

Peneliti : “Bersumber dari manakah anggaran untuk Hibah dan Bansos diBanten ?

Iman Sentosa, S.H : “Dari PAD neng, untuk jumlahnya kurang tau coba tanya Dinsos atau pihak DPPKAD ya.”

Peneliti : “Oke Bapak terima kasih untuk waktunya untuk bertanya perihal E-Hibah Bansos Banten ini”

Hasil Wawancara

Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)

Nama : Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si
Jabatan : Staff Bagian Penerbitan Dan Teknologi Informasi (KOMINFO)
Lokasi : KP3B
Tanggal/Waktu : 17 April 2018 / pukul 13.15 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Ibu, saya ingin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara untuk penelitian saya mengenai Implementasi *E-Government* Hibah dan bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten ini apakah bisa?”

Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si : “Silahkan ada yang bisa dibantu?”

Peneliti : “Siapakah yang memberi dan menerima wewenang untuk menjalankan kebijakan E-Hibah Bansos Banten Bu ?

Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si : “Sebenarnya bagian saya KOMINFO yang menerima wewenang dari pusat, lalu kami mandatkan kepada Biro Kesra untuk melaksanakan Webnya, karna tugas bagian mereka juga seperti itu.”

Peneliti : “Apakah bagian KOMINFO ikut membantu melaksanakan E-Hibah Bansos Banten ?

Yulia Rehan Faradisa, S.pd, M.Si : “Iya kami saling membantu seperlunya tapi tetap bagian Kesra yang bertanggung jawab.”

Hasil Wawancara

Staff DPPKD Provinsi Banten

Nama : Endad Heryanto, S.E., M.Si

Jabatan : Staff DPPKD Provinsi Banten

Lokasi : KP3B

Tanggal/Waktu : 18 April 2018 / pukul 10.00 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Pak, saya ingin minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara untuk penelitian saya mengenai Implementasi *E-Government* Hibah dan bantuan Sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten ini apakah bisa?”

Endad Heryanto, S.E., M.Si : “Walaikumsalam silahkan boleh saja”

Peneliti : “Saya ingin tahu siapa yang mengoperasikan website E-Hibah Bansos Banten disini Pak?”

Endad Heryanto, S.E., M.Si : “Biro Kesra neng.”

Peneliti : “untuk anggaran E-Hibah Bansos Banten itu sendiri darimana pak dan berapa jumlahnya?”

Endad Heryanto, S.E., M.Si : “Dari PAD, Tahun 2018 ini cukup banyak yaitu Rp 487 miliar untuk Hibah dan bantuan Sosialnya. dana hibah

akan diberikan kepada 174 badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Banten dengan nilai yang mencapai Rp 358,9 miliar. Sedangkan penerima dana bansos terdiri dari sebanyak 52.900 individu/keluarga, 48 kelompok masyarakat dan 8 lembaga yang ada di Provinsi Banten dengan total nilai mencapai Rp 128,9 miliar. Dana itu akan diberikan sesuai data yang kami terima,”

Hasil Wawancara

Staff Dinas Sosial

Nama : Desinawati, SKM., M.Si

Jabatan : Staff Dinas Sosial

Lokasi : KP3B

Tanggal/Waktu : 17 April 2018 / pukul 09.00 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Ibu, Mau bertanya ibu apa Dina Sosial yang mengurus website Hibah dan Bantuan sosialnya ?”

Desinawati, SKM., M.Si : “Waalaikumsalam, iya ada apa ya neng?”

Desinawati, SKM., M.Si: “Oh bukan mba silahkan langsung ke Biro Kesranya saja ya, kami hanya mengurus membagikan bantuannya saja tapi yang mengurus penerima bansosnya sendiri Biro Kesra, apalagi Websitenya kan.

Hasil Wawancara

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

Nama : Saiful

Lokasi : Kp. Andamui Tengah RT 010 Kel. Sukawana Kec. Curug

Kota Serang

Tanggal/Waktu : 19 April 2018 / pukul 09.00 WIB

Peneliti : “Assalamualikum mas ini saya yang telepon untuk wawancara untuk skripsi saya mengenai E-Hibah Bansos Banten”

Saiful : “Silahkan mba saya jawab semampunya ya.”

Peneliti : “Apa betul mas termasuk pendaftar E-Hibah Bansos Banten? Dan mengajukan untuk bantuan apa mas?”

Saiful : “Iya betul mba, saya mengajukan bantuan dana untuk biaya kuliah saya.”

Peneliti : “Oh bisa juga ya mas untuk biaya kuliah begitu? Jadi untuk mas sendiri E-Hibah Bansos Banten itu bermanfaat ya?”

Saiful : “Iya bisa aja ko, apapun bisa kayanya yang penting kebutuhan mendesak yang benar – benar butuh mba. Menurut saya mah dipermudah dengan adanya website ini, saya juga kan mahasiswa jadi tau cara ngegunainnya. Kalau untuk saya sendiri mengajukan bantuan dana untuk kuliah saya. Karna saya tidak mampu.punya saya sudah dicantumin Alhamdulillah diweb cuma belum disurvei sampai sekarang, liat yang lain sih sudah ada keterangan di surveynya, semoga saya juga cepat disurvei. Amin.”

Peneliti : “Menurut mas website E-Hibah Bansos Banten sendiri sudah bagus apa belum?”

Saiful : “Mmmh kalau menurut saya tampilan web sendiri apa ya, udah bagus sih mba, kurangnya paling ga update ya habis kadang informasi pendaftar suka hilang suka ada. Terus kayanya ko disurveynya lama padahal diweb uda banyak yang masuk pendaftar baru. Abis itu kurangnya apalagi ya, kayanya ga lengkap aja kaya web lain ada berbagai bahasa gitu. Pokonya webya sih uda bagus cuma terlalu simple mba menurut saya sebagai mahasiswa yang sering buka web ya”

Hasil Wawancara

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

Nama : Siti Sadiyah

Lokasi : Kp. Babakan Dukuh RT 003 RW 02 Kec, Cihara Kab. Lebak

Tanggal/Waktu : 29 April 2018 / pukul 10.00 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Ibu saya mau melakukan wawancara sebentar boleh untuk skripsi saya?”

Siti Sadiyah: “Iya iya nong bisa aja, mau tanya apa?”

Peneliti : “Apa benar ibu mendaftar E-Hibah Bansos Banten? Bantuan apa yang ibu ajukan?”

Siti Sadiyah: “Betul nong ibu daftar di E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten itu, itu geh didaftarkan sama ponakan, soalnya pas itu asalnya ibu ma daftarnya ga pake online begitu nong tapi karna disuruh Biro Kesra ibu nyuruh ponakan coba dibukain terus daftar online juga. Ibu daftarnya ma pas itu langsung ke kantor nong bawa surat2. Ibu minta bantuan supaya rumah ibu dibenerin nong, udah mau ambruk, kan rumah ibu ma dari kayu-kayu nong sekarang udah rapuh kemakan rayap.”

Hasil Wawancara

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

Nama : Nuryamah

Lokasi : Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kab. Lebak

Tanggal/Waktu : 29 April 2018 / pukul 16.00 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum ibu bisa minta waktunya sedikit untuk wawancara mengenai E-Hibah Bansos Banten. Ibu mendaftar di E-Hibah Bansos Banten ya? Saya melihat di daftar pada website jadi saya kemari untuk mengetahui secara langsung bu.”

Nuryamah: “Iya Ibu daftar online itu betul. Asal mulanya daftar ya kebutuhan neng. Itu juga ikut karna tetangga kasih tau, jadi ikutan daftarnya nimbrung sama dia bareng. Namanya dikampung jarang online gitu orang-orangnya, paling anak muda itu juga jarang yang hp mahal neng, jadi pada ga ngerti online begituan.”

Peneliti : “Apa disini pernah ada sosialisasi supaya warga pada tahu web tersebut bu, kan supaya memudahkan warga juga biar bisa pada daftar ya.”

Nuryamah: “Oh, kalau dari pemerintah kesini ngajarin ma belum pernah neng, urusan pemerintah ma paling urusannya ke pak lurah.”

Hasil Wawancara

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

Nama : Encih

Lokasi : Kp. Cimundu RT 003 RW 03 Ds. Cihara Kab. Lebak

Tanggal/Waktu : 29 April 2018, pukul 16.20 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Ibu Encih ya boleh saya wawancara sebentar dengan ibu?” ibu ini salah satu Masyarakat Pendaftar E-Hibah dan Bansos Provinsi Banten betul ya?”

Encih : “maksudnya neng itu apa?”

Peneliti : “Itu yang bantuan ibu mengajukan rumah ibu tidak layak huni ya tertera di website ini bu coba lihat.”

Encih : ”oh masalah bantuan rumah itu ibu didaftarkan kepala desa neng, rumah ibu kan emang ga layak huni karna masih suka banjir, bocor, masih terbuat dari bambu, kayu, jerami, sekarang uda lapuk kemakan usia neng. Ibu ga daftar sendiri hape aja ibu ga punya neng.”

Hasil Wawancara

Masyarakat pendaftar E-Hibah Bansos Provinsi Banten

Nama :Rukmi

Lokasi : Kp. Cihara RT 02 RW 01 Kec, Cihara Kab. Lebak

Tanggal/Waktu : 29 April 2018, pukul 17.00WIB

Peneliti : “Permisi ibu maaf mengganggu, boleh saya wawancara dengan ibu sebentar saja. Saya ingin menanyakan tentang website E-Hibah Bansos Banten dan ibu sebagai salah satu pendaftarnya dan menjadi narasumber saya.

Rukmi : “ibu ma sama warga sini masalah bantuan dari pemerintah biasanya Bapak Rt pak Rusli, yang suka ngedata warga disini yang ga mampu. Suka dapet bantuan benerin jalan, sembako.Katanya sekarang minta bedah rumah ya supaya layak ditempatin.Termasuk rumah saya ini rumah lama dari jaman penjajahan belum pernah dibangun pisan mbaa. Coba lebih jelasnya tanya Pak Rt ya saya kurang pahal kalo daftar begitu mba”

Peneliti : “Baik bu terima kasih informasinya maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum”

Hasil Wawancara

Masyarakat Umum Kota Cilegon

Nama : Entus hariyadi

Lokasi : BBS 2 Jl. Angrek 3 no.3 Ciwedus Cilegon

Tanggal/Waktu : 20 April 2018 / pukul 17.20 WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Pak boleh tanya sebentar, ini saya lagi survey untuk mengetahui apakah tiap kota sudah mengetahui informasi website Bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu website E-Hibah Bansos Banten Pak. Bapak jadi perwakilan masyarakat Kota Cilegon”

Entus Hariyadi : “Ga ada mba informasi website hibah bansos kayak gitu, kita warga kayanya ga dikasih tau tuh sama pak lurah. Coba tanya warga lain barang kali tau.Karna kalau di komplek begini oeangnya pada kerja ya termasuk saya jadi kurang informasi sepertinya. Dan ga ada info apa – apa juga dari Rt dan Lurah”

Peneliti : “Oh seperti itu baik terima kasih untuk wawancaranya pak”

Hasil Wawancara

Masyarakat Umum Kota Serang

Nama : Khalidah

Lokasi : Cipocok jaya

Tanggal/Waktu : 20 April 2018 / pukul 09.30WIB

Peneliti : “Assalamualaikum Bu boleh tanya sebentar, ini saya lagi survey untuk mengetahui apakah tiap kota sudah mengetahui informasi website Bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu website E-Hibah Bansos Banten Bu. Ibu perwakilan dari masyarakat Kota Serang”

Khalidah : “kalau disini bantuan seperti itu biasanya dikoordinir sama kepala desa mba, siapa aja yang tidak mampu lapor ke pak RT kan nanti pak RT ke kepala desa melaporkan warganya siapa aja yang butuh bantuan.

Peneliti : “Biasanya Pak Rt ngajuin bantuan apa saja tau Bu?”

Khalidah : “Selain bantuan untuk warga ga mampu paling juga minta bantuan untuk lingkungan seperti pembenaran jalan rusak juga, terus penambahan plang jalan. Itu sih setau saya ya.”

Hasil Wawancara

Masyarakat Umum Kota Kota Pandeglang

Nama : Risma maulina

Lokasi : Gunung Putri

Tanggal/Waktu : 20 April 2018 / pukul 09.30WIB

Peneliti : “Assalamualaikum mba boleh tanya sebentar, ini saya lagi survey untuk mengetahui apakah tiap kota sudah mengetahui informasi website Bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu website E-Hibah Bansos Banten Bu. mba perwakilan dari masyarakat Kota Pandeglang”

Risma Maulina : “oh iya tau mba, pas itu denger dari tetangga-tetangga lagi ngobrol katanya sekarang gampang mau minta bantuan ke pemerintah bisa online. Taunya dari pak RT disuruh sebarin katanya jadi pada ngerubung diwarung dengernya gitu. Ya bagus kata saya ma biar ga susah ngumpul in syaratnya kan. Biasanya warga sini kan yang urus kurang mampu gitu RT sama lurah. Tapi bagus kalo bisa online mba”

Peneliti : “Baik terima kasih mba untuk waktunya.”

Hasil Wawancara

Masyarakat Umum Kota Kota Tangerang

Nama : Nurul Amanah

Lokasi : Batu Ceper

Tanggal/Waktu : 22 April 2018 / pukul 13.30WIB

Peneliti : “Assalamualaikum mba boleh tanya sebentar, ini saya lagi survey untuk mengetahui apakah tiap kota sudah mengetahui informasi website Bantuan dari Pemerintah Daerah yaitu website E-Hibah Bansos Banten Bu. mba perwakilan dari masyarakat Kota Tangerang”

Nurul : “tau dong mba saya sering baca berita, kan lagi heboh ya masalah hibah bansos di Banten ini. Kalau untuk saya sendiri tau ada web onlinenya, taunya ya karna berita uda banyak ko mba, kalau warga disini sendiri mungkin juga udah banyak kok yang tau, tapi untuk siapa yang uda daftarnya disini kurang tau mba. Coba tanya pak RT, biasanya sih setau saya kalo bantuan itu lewat kepala desa ya. Ada yang data biasanya missal pak RT siapa aja warga sini yang gak mampu nanti dikasi bantuan.”

LAMPIRAN

Berikut jumlah pengunjung website www.ehibahbansos.bantenprov.go.id skala harian, untuk melihat partisipasi masyarakat yang ter *capture* di dalam website;

Lampiran 1

Laporan jumlah pengunjung harian website E-Hibah Bansos Provinsi Banten



Sumber; similiarweb.com, 2017

Berdasarkan lampiran 1 terlihat bahwa pengunjung harian website E-Hibah Bansos Provinsi Banten ada 6.947 untuk jumlah pengunjung tiap halamannya yang dilihat oleh visitor. dan 3.167 pengunjung yang hanya mengakses website tersebut tanpa mengunjungi setiap halamannya, baik mengunjungi website tersebut karena sengaja maupun tidak sengaja.

Lampiran 2

Daftar calon penerima E-Hibah dan Bansos tahun 2015-2017

Tahun 2015

#	Nama Penerima	Alamat	Nama Pemohon	Keterangan
1	Awang	Kp. Bedongan RT 002 RW 013 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Awang	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
2	Radi	Kp. Perikanan RT 001 RW 009 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Radi	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
3	Sodikin	Kp. Pelelangan RT 001 RW 005 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Sodikin	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
4	Murtinah	Kp. Karet RT 003 RW 002 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Murtinah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
5	Jaetun	Kp. Perikanan RT 001 RW 009 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Jaetun	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
6	Kasli	Kp. Pelelangan RT 001 RW 005 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Kasli	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
7	Kapsah	Kp. Pelelangan RT 001 RW 005 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Kapsah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
8	Abd Arkanyah	Kp. Karet RT 003 RW 002 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Abd Arkanyah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
9	Nuryati	Kp. Bedongan RT 002 RW 013 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Nuryati	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
10	Rosita	Kp. Perikanan RT 001 RW 009 Ds. Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	Rosita	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni

#	Nama Penerima	Alamat	Nama Pemohon	Keterangan
11	Sukinah	Kp. Sukajadi RT 002 RW 003 Ds. Gombang Kec. Parimbang Kab. Pandeglang	Sukinah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
12	Sainah	Kp. Sukajadi RT 001 RW 003 Ds. Gombang Kec. Parimbang Kab. Pandeglang	Sainah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
13	Ambari	Kp. Pasir Lame RT 013 RW 005 Ds. Pasirbuyut Kec. Jawilan Kab. Serang	Ambari	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
14	Mei	Kp. Cinfawana RT 002 RW 09 Ds. Bayah Timur Kec. Bayah Kab. Lebak	Mei	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
15	Suanti	Kp. Bungkeureuk RT 001 RW 07 Ds. Bayah Timur Kec. Bayah Kab. Lebak	Suanti	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
16	Neneng Sri Adiah	Kp. Wanungluni RT 001 RW 03 Ds. Hegarnasih Kec. Panggarangan Kab. Lebak	Neneng Sri Adiah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
17	Eneng Yanti	Kp. Wanungluni RT 003 RW 03 Ds. Hegarnasih Kec. Panggarangan Kab. Lebak	Eneng Yanti	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
18	Neneng Rahma	Kp. Cimanggang RT 003 RW 03 Ds. Panggarangan Kec. Panggarangan Kab. Lebak	Neneng Rahma	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
19	Uneh	Kp. Cihara RT 002 RW 01 Ds. Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	Uneh	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
20	Juarsih	Kp. Cikabang RT 001 RW 02 Ds. Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	Juarsih	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni

#	Nama Penerima	Alamat	Nama Pemohon	Keterangan
21	Ench	Kp. Cimundu RT 003 RW 03 Ds. Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	Ench	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
22	Siti Sadiyah	Kp. Babakan Dukuh RT 003 RW 02 Ds. Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	Siti Sadiyah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
23	Rukmi	Kp. Cihara RT 002 RW 01 Ds. Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak	Rukmi	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
24	Neni	Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kec. Malingping Kab. Lebak	Neni	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
25	Nuryamah	Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kec. Malingping Kab. Lebak	Nuryamah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
26	Eruti	Kp. Cipeundeuy Warung RT 002 RW 02 Ds. Kersaratu Kec. Malingping Kab. Lebak	Eruti	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
27	Rufanah	Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kec. Malingping Kab. Lebak	Rufanah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
28	Armi	Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kec. Malingping Kab. Lebak	Armi	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
29	Rumenah	Kp. Cledes RT 010 RW 004 Ds. Sumberwaras Kec. Malingping Kab. Lebak	Rumenah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
30	Sarniti	Kp. Sompok RT 009 RW 003 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Sarniti	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni

#	Nama Penerima	Alamat	Nama Pemohon	Keterangan
31	Ranis	Kp. Cikaraton RT 012 RW 004 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Ranis	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
32	Rumsah	Kp. Cledes RT 010 RW 004 Ds. Sumberwaras Kec. Malingping Kab. Lebak	Rumsah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
33	Muni	Kp. Kadugawir RT 017 RW 006 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Muni	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
34	Ade B	Kp. Cikaraton RT 012 RW 005 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Ade B	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
35	Santimah	Kp. Sompok RT 007 RW 003 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Santimah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
36	Oom	Kp. Pangenggang RT 002 RW 001 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Oom	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
37	Emah	Kp. Cledes RT 010 RW 004 Ds. Sumberwaras Kec. Malingping Kab. Lebak	Emah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
38	Saniah	Kp. Pangenggang RT 001 RW 001 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Saniah	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
39	Rani	Kp. Sukatani RT 006 RW 002 Ds. Sumber Waras Kec. Malingping Kab. Lebak	Rani	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni
40	Agung Restu	Kp. Andamui Tengah RT 010 RW 001 Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang	Agung Restu	Rumah Sederhana Rumah Tidak Layak Huni

Sumber; www.ehibahbansos.bantenprov.go.id

Berdasarkan tabel lampiran 2 terlihat jumlah pendaftar melalui website E-Hibah Bansos Provinsi Banten pada tahun 2015-2016 mencapai 40 (empat puluh) penerima hibah dan bansos.

Daftar calon penerima E-Hibah dan Bansos Tahun 2017

Daftar Calon Penerima Bansos Tidak Terencana Tahun 2017

Kategori Sakit

Show 10 Rows

No	Nama Pelapor	Nama Penerima	Status	Aksi
1	Khrisyah	Intehich	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
2	Ditipodiy	Pryjasthiky	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
3	Rahmatullah	Hisa Nurul (22)	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
4	Pudjony	Pudjony	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
5	Samsudin	Mansul	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
6	Widi Widi Kari	Sattuzil	Belum Mendapatkan Respon	Q. WIKI
7		Sarji	Sudah di Survei	Q. WIKI
8		Safar	Sudah di Survei	Q. WIKI
9		Korlah	Sudah di Survei	Q. WIKI
10		Rizyans	Sudah di Survei	Q. WIKI

Showing 1 to 10 of 10 entries

Daftar Calon Penerima Bansos Tidak Terencana Tahun 2017

Kategori Sakit

Show 10 Rows

No	Nama Pelapor	Nama Penerima	Status	Aksi
11		M. Dwi Widi Nugroho	Sudah di Survei	Q. WIKI
12		Sarji	Sudah di Survei	Q. WIKI
13		Rahmatullah	Sudah di Survei	Q. WIKI
14		Kusum	Sudah di Survei	Q. WIKI
15	Mahdoh	Dinda Hidayatullah	Terdapat Foto/Video	Q. WIKI

Showing 11 to 15 of 15 entries

Sumber : www.ehibahbansos.bantenprov.go.id, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah pendaftar melalui website E-Hibah Bansos Provinsi Banten pada tahun 2017 adalah 15 (lima belas) calon penerima hibah dan bansos.

Daftar calon penerima E-Hibah dan Bansos Tahun 2018

Daftar Calon Penerima Bansos Tidak Terencana Tahun 2018

Kategori Sakit

Show 11 Rows

#	Nama Pelapor	Nama Penerima	Status
1		Sarpi	Sudah di Survei
2		Sahari	Sudah di Survei
3		Korlah	Sudah di Survei
4		Fitriyani	Sudah di Survei
5		M. Dwi Rifki Nugroho	Sudah di Survei
6		Safit	Sudah di Survei
7		Rumihah	Sudah di Survei
8		Kokom	Sudah di Survei
9	Mahdudi	Dalia Rohmahati	Telah di Follow Up

Sumber : www.ehibahbansos.bantenprov.go.id, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah pendaftar melalui website E-Hibah Bansos Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah 9 (sembilan) calon penerima hibah dan bansos.

Dilihat dari tabel diatas terlihat masih kurangnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan maupun program yang pemerintah terapkan, yaitu bentuk dari kurang sadarnya peran masyarakat terhadap pemerintahan padahal masyarakat sebenarnya berperan sebagai penerima kebijakan sekaligus pemantau kinerja dari pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, terbuka, dan

bertanggung jawab atau ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat seperti yang sudah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya.

Lampiran 3

Struktur Organisasi Organisasi Biro Kesra Setda Provinsi Banten



Lampiran 4

Dokumentasi wawancara bersama Staff Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat, Bapak Iman Sentosa, S.H



Senin, 17 April 2018 (Lokasi : Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat, KP3B)

Lampiran 5

Daftar Absensi Anggota Biro Kesejahteraan Rakyat



Senin, 17 April 2018

Sosialisasi Biro Kesejahteraan Rakyat terhadap Aplikasi E-Hibah Bansos



Rabu, 20 Juni 2014 (Lokasi : Biro Kesejahteraan Rakyat, KP3B)

Lampiran 6

Wawancara dengan Ibu Khalidah



Khalidah, Masyarakat Cipocok Jaya Kota Serang, 20 April 2018

Wawancara Dengan Bapak Entus Hariyadi



Entus Hariyadi, BBS 2 Jl. Angrek 3 no.3 Ciwedus Cilegon, 20 April 2018

Lampiran 7

Foto Rumah Siti Sadiyah



(Kp. Babakan Dukuh RT 003 RW 02 Kec, Cihara Kab. Lebak)

Foto Rumah Nuryamah



Jumat, 29 April 2018

(Lokasi : Kp. Sukamaju RT 003 RW 02 Ds. Kersaratu Kab. Lebak)

Lampiran 8

Foto Rumah Encih



Jumat, 29 April 2018(Lokasi: Kp. Cimundu RT 003 RW 03 Ds. Cihara Kab. Lebak)

Wawancara dengan Saiful



(Saiful, Kp. Andamui Tengah RT 010 Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang, 19 April 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUPData Pribadi

Nama : Ina Pratiwi

Tempat Tanggal Lahir : Serang, 10 Oktober 1993

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Email : Inapратиwi6@gmail.com

No telp : 089619420878

Pengalaman Organisasi : - Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam FISIP

Pendidikan Formal :

- 2012 – Sekarang : Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial
& Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- 2009 - 2012 : SMAN 3 Cilegon
- 2006 - 2009 : SMPN 2 Cilegon
- 2000 - 2006 : SD YPWKS V Cilegon